

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-10/PB/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH SEKTOR KORPORASI PUBLIK

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia, entitas yang dicakup dalam Manual Statistik Keuangan meliputi entitas pemerintah pusat, entitas pemerintah daerah, dan entitas korporasi publik;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah sektor korporasi publik, perlu diatur petunjuk teknis penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Sektor Korporasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Sektor Korporasi Publik;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2084);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH SEKTOR KORPORASI PUBLIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat LSKP adalah laporan yang disusun dalam rangka pengambilan kebijakan fiskal dan makro ekonomi selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah.
2. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Sektor Korporasi Publik yang selanjutnya disingkat LSKP Korporasi Publik adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan sektor korporasi publik secara komprehensif mencakup korporasi publik keuangan dan nonkeuangan.
3. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Entitas Lainnya adalah entitas selain BUMN dan BUMD yang diklasifikasikan sebagai Korporasi Publik berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.
6. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaporan keuangan.
7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah Unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut DJPb adalah Unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang selanjutnya disebut Direktorat APK adalah Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan dan tugas lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
10. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPb adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
12. Laporan Arus Ekonomi Lainnya adalah laporan yang menyajikan perubahan aset, kewajiban, dan kekayaan neto yang berasal dari sumber selain transaksi yang diklasifikasikan berdasarkan perubahan nilai atau volume aset, kewajiban, dan kekayaan neto.
13. Laporan Keuangan Gabungan Korporasi Publik Keuangan yang selanjutnya disebut LK Gabungan Korporasi Publik Keuangan adalah laporan manajerial yang berisi gabungan laporan keuangan BUMN, BUMD, dan Entitas Lainnya dengan klasifikasi jenis usaha aktivitas keuangan dan asuransi sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
14. Laporan Keuangan Gabungan Korporasi Publik Nonkeuangan yang selanjutnya disebut LK Gabungan Korporasi Publik Nonkeuangan adalah laporan manajerial yang berisi gabungan laporan keuangan BUMN, BUMD, dan Entitas Lainnya dengan klasifikasi jenis usaha selain aktivitas keuangan dan asuransi sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
15. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah adalah laporan yang menyajikan ringkasan transaksi yang berasal dari interaksi yang disepakati bersama antara unit institusi pada suatu periode pelaporan yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan.
16. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas adalah laporan yang mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar untuk operasi tahun berjalan, transaksi aset nonkeuangan, transaksi aset keuangan, dan kewajiban selain uang dan deposito.
17. Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia adalah manual/pedoman yang menyediakan kerangka konseptual dan pelaporan untuk menghasilkan data yang komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan

statistik seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts-SNA*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), dan Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*), sebagai acuan dalam melaksanakan Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga data Statistik Keuangan Pemerintah dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan fiskal, khususnya kinerja sektor pemerintah umum dan sektor publik.

18. *Mapping* adalah suatu proses penyesuaian sistematis berupa reklasifikasi sumber data berupa Bagan Akun Standar (BAS) sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan yang sesuai dengan BAS statistik keuangan pemerintah.
19. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah adalah laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan neto pada akhir periode pelaporan.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Sektor Korporasi Publik adalah Klasifikasi Sektor dalam Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia yang terdiri dari entitas yang memenuhi kriteria residen perekonomian dalam Negara Indonesia, unit institusi yang dikendalikan oleh pemerintah atau satu kesatuan dengan unit institusi pemerintah yang mengendalikannya dan produsen pasar.
22. Statistik Keuangan Pemerintah adalah suatu sistem pelaporan yang menghasilkan data yang komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah dan sektor publik yang dilaksanakan dengan mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.
23. Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia Korporasi Publik yang selanjutnya disebut SIKRI-KP merupakan sistem informasi yang digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Korporasi Publik Keuangan, Laporan Keuangan Gabungan Korporasi Publik Nonkeuangan, dan LSKP Korporasi Publik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai petunjuk teknis penyusunan LSKP Korporasi Publik yang meliputi:
 - a. Mekanisme penyusunan LSKP Korporasi Publik; dan
 - b. Pelaporan LSKP Korporasi Publik.

- (2) LSKP Korporasi Publik mencakup entitas BUMN, BUMD, dan Entitas Lainnya yang memenuhi kriteria Korporasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN LSKP KORPORASI PUBLIK

Pasal 3

- (1) Mekanisme penyusunan LSKP Korporasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Identifikasi entitas korporasi publik;
 - b. Pengumpulan data;
 - c. Penyiapan dan verifikasi data; dan
 - d. Penyusunan laporan.
- (2) Penyusunan LSKP Korporasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode tahunan.
- (3) Implementasi penyusunan LSKP Korporasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan oleh Direktur APK.

Bagian Kesatu

Identifikasi Entitas Korporasi Publik

Pasal 4

- (1) Identifikasi entitas yang termasuk dalam Sektor Korporasi Publik dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat APK dengan cakupan BUMN dan Entitas Lainnya di tingkat nasional.
 - b. Kanwil DJPb dengan cakupan BUMD dan Entitas Lainnya di tingkat wilayah.
- (2) Hasil identifikasi entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada KPPN di lingkup wilayah kerjanya.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pengumpulan data.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat APK untuk data laporan keuangan BUMN dan Entitas Lainnya di tingkat nasional.
 - b. KPPN untuk data laporan keuangan BUMD dan Entitas Lainnya di lingkup wilayah kerjanya.
- (2) Pengumpulan data laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
 - a. Permintaan data;
 - b. Pertukaran data;
 - c. Publikasi resmi; dan/atau
 - d. Interkoneksi SIKRI-KP.
- (3) Pengumpulan data laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari sumber sebagai berikut:
 - a. Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Direktorat Kekayaan Negara yang Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk BUMN dan Entitas Lainnya di tingkat nasional;
 - b. Pemerintah Daerah untuk BUMD dan Entitas Lainnya di daerah; dan/atau
 - c. Sumber resmi lainnya yang menyediakan data terkait.
- (4) Data laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Data posisi keuangan yang mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas serta perubahan ekuitas;
 - b. Data kinerja operasional yang memuat pendapatan (*revenue*), beban (*expense*), laba (*profit*), dan kerugian (*loss*);
 - c. Data arus kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil pengumpulan data laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, KPPN menyampaikan kepada Kanwil DJPb berupa:
 - a. *Softcopy* data laporan keuangan entitas korporasi publik;
 - b. Daftar entitas korporasi publik per kabupaten/kota; dan
 - c. Daftar laporan keuangan entitas korporasi publik yang tidak dapat diperoleh.
- (2) Periode pengumpulan dan penyampaian data laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan keuangan.

Bagian Ketiga
Penyiapan dan Verifikasi Data

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil pengumpulan data laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktorat APK dan KPPN melakukan pengisian data detail laporan keuangan pada kertas kerja dan mengunggah kertas kerja dimaksud pada SIKRI-KP.
- (2) Data detail laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Laba dan Rugi;
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - d. Laporan Arus Kas.
- (3) Selain pengisian dan pengunggahan kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat APK dan KPPN melakukan penginputan data transaksi resiprokal pada SIKRI-KP.
- (4) Dalam hal data detail laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui interkoneksi sistem, maka proses pengisian dan unggah data tidak diperlukan.
- (5) Periode pengisian dan unggah kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan keuangan.
- (6) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Dalam memberikan keyakinan atas keandalan data, Direktorat APK dan KPPN melakukan:
 - a. Verifikasi data antara data laporan keuangan Korporasi Publik dengan kertas kerja yang diunggah di SIKRI-KP; dan
 - b. *Approval* atas hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Untuk meningkatkan keandalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kanwil DJPb melakukan verifikasi dan monitoring atas hasil pengumpulan data yang disampaikan oleh KPPN.
- (3) Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kanwil DJPb menyampaikan kepada Direktorat APK berupa:
 - a. Daftar BUMD dan Entitas Lainnya di daerah per provinsi dan kabupaten/kota; dan

- b. Daftar laporan keuangan BUMD dan Entitas Lainnya di daerah yang tidak dapat diperoleh lingkup wilayah kerja Kanwil DJPb kepada Direktorat APK.

Bagian Keempat
Penyusunan Laporan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), Direktorat APK menyusun:
 - a. LK Gabungan Korporasi Publik Keuangan;
 - b. LK Gabungan Korporasi Publik Non Keuangan; dan
 - c. LSKP Korporasi Publik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan penggabungan dari kertas kerja laporan keuangan BUMN, BUMD, dan Entitas Lainnya.
- (3) LSKP Korporasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihasilkan dari *mapping* atas Bagan Akun Standar ke dalam klasifikasi statistik keuangan sesuai dengan Manual Statistik Keuangan Pemerintah Indonesia.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (5) LSKP Korporasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Laporan Operasional Statistik Keuangan Korporasi Publik;
 - b. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Korporasi Publik;
 - c. Neraca Statistik Keuangan Korporasi Publik;
 - d. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Korporasi Publik; dan
 - e. Metadata.
- (6) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e merupakan penjelasan mengenai data laporan keuangan BUMN, BUMD, dan Entitas Lainnya yang meliputi:
 - a. Informasi dasar;
 - b. Unit penyusun laporan;
 - c. Identitas unit penyusun laporan; dan
 - d. Informasi lainnya.
- (7) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Definisi dan cakupan data;
 - b. Periodeisasi dan ketepatan waktu publikasi;
 - c. Jadwal publikasi ke depan;
 - d. Sumber data;
 - e. Metodologi;

- f. Integritas data; dan
 - g. Akses data.
- (8) Apabila terdapat data laporan keuangan BUMD yang tidak tersedia, Direktorat APK dapat melakukan estimasi.
 - (9) Pada penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan eliminasi transaksi resiprokal antar entitas korporasi publik.

Pasal 10

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan LSKP Korporasi Publik berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Direktur APK dapat menetapkan kebijakan terkait penyusunan dan pelaporan LSKP Korporasi Publik.

BAB IV

PELAPORAN LSKP KORPORASI PUBLIK

Pasal 11

- (1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat APK menyampaikan LSKP Korporasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c kepada Menteri Keuangan.
- (2) LSKP Korporasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan keuangan.
- (3) LSKP Korporasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bentuk transparansi fiskal Pemerintah.

Pasal 12

- (1) LSKP Korporasi Publik tahunan yang masih menggunakan angka laporan keuangan *unaudited* dan/atau estimasi merupakan LSKP Korporasi Publik dengan angka sementara.
- (2) Dalam hal terdapat kesalahan, kekurangan, atau perubahan yang bersifat materil terhadap angka yang tersaji pada LSKP Korporasi Publik, Direktorat APK melakukan pemutakhiran atas hal tersebut.
- (3) Pemutakhiran atas kesalahan, kekurangan, atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Keuangan pada periode pelaporan berikutnya.

- (4) LSKP Korporasi Publik tahunan yang disusun seluruhnya menggunakan data laporan keuangan yang telah diaudit dan/atau tidak terdapat perubahan dalam 2 (dua) tahun secara berturut-turut merupakan LSKP Korporasi Publik dengan angka tetap.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-10/PB/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN
STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH SEKTOR KORPORASI
PUBLIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bagian Penjelasan menyebutkan bahwa laporan keuangan Pemerintah agar dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah (*Government Finance Statistics/GFS*) sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara (*cross-country studies*). Amanat tersebut ditindaklanjuti Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang memberikan landasan agar Pemerintah mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah.

Sebagai wujud dari upaya peningkatan pengelolaan sistem keuangan negara, Pemerintah menyusun laporan manajerial berupa Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) yang dihasilkan dari konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah. Konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah diperlukan untuk menghasilkan informasi aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah berupa ringkasan informasi kinerja dan posisi keuangan secara keseluruhan pada sektor pemerintah umum (*general government*), sektor korporasi publik (*public corporation*), dan sektor publik (*public sector*) sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Dalam cakupan sektor korporasi publik, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyusun Laporan Keuangan Gabungan Korporasi Publik Keuangan (LKG-K) dan Laporan Keuangan Gabungan Korporasi Publik Non Keuangan (LKG-NK) yang merupakan gabungan laporan keuangan entitas BUMN, BUMD, dan Entitas Lainnya berdasarkan sektorisasi yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020. Identifikasi atas entitas yang tergabung dalam LKG-K dan LKG-NK merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, dan Manual Statistik Keuangan Pemerintah terkait karakteristik korporasi publik. LKG-K dan LKG-NK merupakan laporan manajerial sebagai bentuk transparansi fiskal Pemerintah dan bukan sebagai laporan pertanggungjawaban.

Dalam rangka menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah sektor Korporasi Publik (LSKP-KP), data laporan keuangan entitas korporasi publik di-*mapping* menggunakan bagan akun dan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah. LSKP-KP merupakan laporan yang disusun dalam rangka menghasilkan data yang komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan korporasi publik. LSKP-KP juga disusun untuk dikonsolidasikan dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum (LSKPU) untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan sektor publik. Penerapan statistik keuangan Pemerintah ini dapat menghasilkan jembatan untuk

menerjemahkan informasi akuntansi sehingga mudah dipahami karena sejalan dengan sistem statistik makroekonomi dan bermanfaat dalam pengambilan kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan ekonomi.

Dalam rangka mendukung analisis dan kajian fiskal di tingkat wilayah, diperlukan pengumpulan data BUMD pada masing-masing pemerintah daerah dengan melibatkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk dihasilkan LKG-K dan LKG-NK, serta LSKP-KP. Kolaborasi dengan kantor vertikal menjadi sangat penting mempertimbangkan jumlah entitas BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia, dan masing-masing pemerintah daerah selaku pemilik modal mayoritas BUMD merupakan mitra kerja KPPN. Pengumpulan data BUMD ini selanjutnya juga dapat dioptimalkan untuk mendukung fungsi KPPN sebagai *financial advisor* di daerah.

B. SEKTORISASI KORPORASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014, secara umum suatu entitas diklasifikasikan dalam sektor korporasi publik jika:

a. Entitas tersebut merupakan residen perekonomian negara tersebut

Kompilasi data statistik dilakukan terhadap entitas korporasi publik yang merupakan residen suatu negara terlepas dari lokasi fisiknya. Residen korporasi publik dapat memiliki residen korporasi di negara lain.

b. Entitas tersebut merupakan unit institusi yang dikendalikan oleh pemerintah atau satu kesatuan dengan unit institusi pemerintah yang mengendalikannya.

Korporasi publik merupakan entitas yang dikendalikan pemerintah dengan aktivitas utama berupa aktivitas komersial, namun dapat melaksanakan kebijakan fiskal dalam aktivitasnya. Sebagai contoh, korporasi publik dapat melaksanakan operasi pemerintah atas nama unit pemerintah yang memilikinya, seperti meminjamkan uang dengan bunga yang lebih rendah dari bunga pasar untuk pihak tertentu.

c. Entitas tersebut merupakan produsen non pasar.

Pengklasifikasian unit pemerintah (produsen non pasar) atau korporasi publik atau kuasi-korporasi publik (produsen pasar) didasarkan pada apakah unit tersebut menjual outputnya sebesar harga yang signifikan secara ekonomi. Unit yang tidak menjual semua atau sebagian besar *output*-nya sebesar harga yang signifikan secara ekonomi merupakan unit pemerintah umum. Sedangkan, unit yang menjual semua atau sebagian besar *output*-nya sebesar harga yang signifikan secara ekonomi merupakan korporasi publik atau kuasi-korporasi. Jika unit tersebut hanya menjual sebagian *output* dengan harga yang signifikan secara ekonomi, mempunyai akun yang lengkap dan dimungkinkan untuk mengidentifikasi kuasi-korporasi di dalam unit tersebut, maka unit tersebut merupakan kuasi-korporasi.

Untuk tujuan analitis, korporasi publik dikelompokkan ke dalam subsektor berikut, dengan merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020:

a. Korporasi Publik Keuangan

Mencakup seluruh entitas BUMN, BUMD, dan Entitas Lainnya yang termasuk dalam klasifikasi Aktivitas Keuangan dan Asuransi dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dana Jaminan Sosial Wajib sebagaimana klasifikasi huruf K dan huruf O subklasifikasi Dana Jaminan Sosial Wajib pada KBLI 2020.

b. Korporasi Publik Non Keuangan

Mencakup seluruh entitas BUMN, BUMD, dan Entitas Lainnya selain yang termasuk dalam klasifikasi pada poin (a).

C. SUMBER DATA

Data laporan keuangan korporasi publik terdiri dari data laporan keuangan BUMN, BUMD, dan Entitas Lainnya. Sumber data laporan keuangan tersebut sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 Sumber Data Laporan Keuangan Entitas

Entitas	Sumber Data	Keterangan
BUMN	Kementerian BUMN	Data per entitas BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN sebagaimana dalam Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN termasuk data transaksi resiprokal antar BUMN
	Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN	Data per entitas BUMN di bawah pembinaan Kementerian Keuangan
BUMD	Kementerian Dalam Negeri	Data per entitas BUMD yang dihimpun oleh Kementerian Dalam Negeri
	Pemerintah Daerah	Data berupa laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan
Entitas Lainnya	Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN	Data per entitas Entitas Lainnya yang disediakan oleh Ditjen Kekayaan Negara
	Pemerintah Daerah	Data berupa laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan

Berkaitan dengan data BUMD yang dikumpulkan KPPN, Kanwil DJPb melakukan identifikasi entitas terlebih dahulu. Identifikasi dapat dilakukan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Atas hasil identifikasi tersebut, Seksi Bank KPPN melakukan konfirmasi ke Pemerintah Daerah cq Biro/Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah atau Bendahara Umum Daerah. Dalam hal, terdapat perbedaan data antara daftar BUMD dengan hasil konfirmasi, Seksi Bank KPPN menyampaikan perbedaan tersebut kepada Kanwil DJPb.

BAB II

PENYUSUNAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH SEKTOR KORPORASI PUBLIK

A. IDENTIFIKASI ENTITAS KORPORASI PUBLIK

Suatu entitas yang meliputi BUMN, BUMD dan Entitas Lainnya diidentifikasi sebagai korporasi publik sesuai karakteristik pada GFS Manual 2014 sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014. Definisi dan karakteristik BUMN dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan BUMD pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 memiliki perbedaan dengan kriteria Korporasi Publik berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014.

Beberapa perbedaan definisi BUMN dan BUMD dengan kriteria Korporasi Publik sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan BUMN-BUMD dan Korporasi Publik

Kriteria	BUMN dan BUMD	Korporasi Publik
Kepemilikan	51% s.d. 100% dimiliki oleh 1 (satu) pemerintah/daerah	Mayoritas kepemilikan dapat dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) pemerintah/daerah
Kendali Pemerintah	Pengendalian pemerintah terlihat dari hak suara mayoritas	Pengendalian dapat berupa hak suara mayoritas, <i>golden shares</i> , kendali komite/badan pengelola, kendali atas penunjukan/pemberhentian pegawai utama, pengendalian melalui regulasi, dan bentuk pengendalian lainnya
Produsen Pasar	Tidak harus memenuhi indikator produsen pasar	Harus memenuhi indikator produsen pasar

Selain itu, identifikasi juga dilakukan terhadap entitas yang termasuk ke dalam kriteria Korporasi Publik tetapi bukan merupakan BUMN dan BUMD, untuk selanjutnya diklasifikasikan sebagai Entitas Lainnya.

Tahapan Identifikasi Entitas:

1. Dit. APK melakukan identifikasi BUMN melalui Kementerian BUMN, dengan memperhatikan dinamika jumlah BUMN setiap periode yang berpotensi berubah akibat adanya proses kepailitan, penggabungan, dan *holding*. Identifikasi Entitas Lainnya dilakukan melalui DJKN/sumber resmi lainnya. Atas identifikasi tersebut, dilakukan pengelolaan referensi entitas pada SIKRI-KP oleh Direktorat APK.Kanwil DJPb c.q. Seksi PSAPD melakukan identifikasi BUMD dan Entitas Lainnya melalui LKPD. Hasil identifikasi kemudian disampaikan ke KPPN di wilayah kerjanya.
2. Identifikasi Korporasi Publik dilakukan dengan memperhatikan 2 kriteria utama, yaitu : (1) **kendali pemerintah**, dan (2) **produsen pasar**. Kriteria kendali pemerintah dan produsen pasar sebagaimana uraian **Box 1**.

Box 1. Kendali Pemerintah dan Produsen Pasar

Kendali pemerintah atas korporasi diartikan sebagai kemampuan Pemerintah untuk menentukan kebijakan korporasi secara umum. Untuk menentukan apakah suatu entitas dikendalikan oleh Pemerintah, dapat mempertimbangkan delapan indikator berikut:

1. Kepemilikan/hak suara mayoritas
2. Kendali atas komite atau badan pengelola
3. Kendali atas penunjukan atau pemberhentian pegawai utama
4. Kendali atas komite utama
5. *Golden shares* dan opsi saham
6. Pengendalian melalui regulasi
7. Pengendalian oleh pelanggan sektor publik yang dominan, sehingga korporasi tidak dapat memilih untuk bertransaksi dengan pelanggan non sektor publik
8. Pengendalian akibat klausul dari pinjaman pemerintah

Walaupun satu indikator cukup untuk mengindikasikan adanya pengendalian Pemerintah, indikator lainnya dapat secara bersama mengindikasikan pengendalian. Keputusan mengenai ada atau tidaknya kendali Pemerintah diambil berdasarkan pertimbangan keseluruhan indikator.

Produsen pasar ditentukan untuk mengklasifikasikan apakah suatu entitas masuk ke dalam sektor Pemerintah Umum (non produsen pasar) atau sektor Korporasi Publik (produsen pasar). Untuk menentukan apakah suatu korporasi merupakan produsen pasar atau bukan, dapat dilakukan penilaian atas enam indikator berikut:

Indikator	Non Produsen Pasar	Produsen Pasar
Pelanggan	Hanya pemerintah	Terbuka untuk semua pelanggan
Kompetisi	Monopoli	Ada persaingan usaha untuk penyedia sejenis
Tarif/harga yang signifikan secara ekonomis	Pendapatan usaha tidak dapat menutupi beban usaha (selain subsidi/kompensasi/bantuan pemerintah)	Pendapatan usaha dapat menutupi beban usaha
Profitabilitas	Tidak <i>profitable</i>	<i>Profitable</i> (dapat terlihat dari besarnya <i>retained earnings</i> /saldo laba dibandingkan Modal Saham/Dasar, besaran dan frekuensi pembagian dividen)
Pembiayaan dari Pemerintah	Pendanaan dari Pemerintah, tambahan modal dari Pemerintah	Pendanaan secara mandiri melalui pendapatan usaha dan laba bersih
Penentuan tarif/harga	Diatur Pemerintah	Mengikuti mekanisme pasar (<i>supply and demand</i>)

3. BUMN dan BUMD yang tidak sesuai kriteria Korporasi Publik diklasifikasikan ke dalam sektor Pemerintah Umum.
4. Entitas yang teridentifikasi selain BUMN dan BUMD dan sesuai dengan kriteria Korporasi Publik disebut dengan Entitas Lainnya.
5. Berdasarkan Nota Dinas Identifikasi Entitas Korporasi Publik Lingkup Provinsi, KPPN c.q. Seksi Bank melakukan konfirmasi daftar entitas korporasi publik dan pengumpulan data laporan keuangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerjanya (dapat melalui Biro/Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah atau Bendahara Umum Daerah).
6. Dari hasil konfirmasi dan pengumpulan data entitas korporasi publik, KPPN c.q. Seksi Verifikasi dan Akuntansi atau Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal (Vera/VeraKI) melakukan pengelolaan referensi entitas yang berupa proses usulan Rekam, Ubah, dan Hapus entitas.

7. Berdasarkan pengelolaan referensi entitas oleh Seksi Vera/VeraKI, Kanwil DJPb melakukan persetujuan/penolakan Rekam/Ubah/Hapus entitas pada SIKRI-KP.

Box 2. Contoh Kasus Identifikasi Entitas

A. Perekaman Entitas

No	Pemda Pemegang Saham	% Kepemilikan	Provinsi
1	Provinsi Sulawesi Selatan	33,03%	Sulawesi Selatan
2	Kota Makassar	4,17%	Sulawesi Selatan
3	Kota Parepare	2,24%	Sulawesi Selatan
4	Kabupaten Luwu Timur	6,17%	Sulawesi Selatan
5	Kabupaten Wajo	4,44%	Sulawesi Selatan
6	Kabupaten Soppeng	4,06%	Sulawesi Selatan
7	Kabupaten Bone	3,68%	Sulawesi Selatan
8	Kabupaten Enrekang	3,36%	Sulawesi Selatan
9	Kabupaten Pangkep	3,26%	Sulawesi Selatan
10	Kabupaten Selayar	2,90%	Sulawesi Selatan
11	Kabupaten Pinrang	2,67%	Sulawesi Selatan
12	Kabupaten Maros	2,62%	Sulawesi Selatan
13	Kabupaten Barru	2,51%	Sulawesi Selatan
14	Kabupaten Takalar	2,43%	Sulawesi Selatan
15	Kabupaten Tana Toraja	1,86%	Sulawesi Selatan
16	Kabupaten Jeneponto	1,81%	Sulawesi Selatan
17	Kabupaten Bantaeng	1,56%	Sulawesi Selatan
18	Kabupaten Luwu	1,50%	Sulawesi Selatan
19	Kabupaten Sidrap	1,44%	Sulawesi Selatan
20	Kabupaten Gowa	1,38%	Sulawesi Selatan
21	Kabupaten Sinjai	1,31%	Sulawesi Selatan
22	Kabupaten Toraja Utara	1,21%	Sulawesi Selatan
23	Kabupaten Mamuju	1,07%	Sulawesi Selatan
24	Kabupaten Bulukumba	0,93%	Sulawesi Selatan
25	Kabupaten Luwu Utara	0,78%	Sulawesi Selatan
26	Provinsi Sulawesi Barat	2,05%	Sulawesi Barat
27	Kota Palopo	1,58%	Sulawesi Barat
28	Kabupaten Polman	0,98%	Sulawesi Barat
29	Kabupaten Majene	0,83%	Sulawesi Barat
30	Kabupaten Mamasa	0,83%	Sulawesi Barat
31	Kabupaten Mamuju Utara	0,80%	Sulawesi Barat
32	Kabupaten Mamuju Tengah	0,14%	Sulawesi Barat
33	Koperasi Jasa Kesejahteraan Warga PT Bank Sulselbar	0,40%	-
	JUMLAH	100,00%	

PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada pasal 5 menjelaskan tentang 2 jenis BUMD, yaitu:

1. Perusahaan Umum Daerah, yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham; dan
2. Perusahaan Perseroan Daerah, yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

Box 2. Contoh Kasus Identifikasi Entitas ... (lanjutan)

Jika dibandingkan dengan kondisi pada tabel komposisi pemegang saham PT. Bank Sulselbar di atas, tidak terdapat 1 (satu) pemerintah daerah yang memegang kepemilikan minimal 51%. Namun, mengingat bahwa gabungan seluruh pemerintah daerah dalam komposisi kepemilikan saham sudah cukup untuk menunjukkan adanya **kendali pemerintah**, entitas dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai entitas korporasi publik.

Menimbang kondisi di atas, dalam tahap Identifikasi Entitas dilakukan hal sebagai berikut:

1. Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan dan Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat menemukan informasi mengenai Investasi Jangka Panjang Permanen pada LKPD di wilayah kerjanya. Dari informasi pada LKPD, ditemukan mengenai kepemilikan masing-masing pemerintah daerah pada PT. Bank Sulselbar.
2. Atas informasi tersebut, Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan mengidentifikasi PT. Bank Sulselbar sebagai entitas di wilayah kerjanya dengan pertimbangan bahwa gabungan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 92,39% dan memenuhi kriteria **kendali pemerintah** (lihat **Box 1. Kendali Pemerintah dan Produsen Pasar**).
3. Sedangkan Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat tidak mengidentifikasi entitas dimaksud dengan pertimbangan gabungan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Barat hanya mencapai 7,21%.
4. Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan memasukkan informasi terkait PT. Bank Sulselbar sebagai entitas korporasi publik di wilayahnya, yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. Nama Entitas: PT. Bank Sulselbar
 - b. Informasi Lokasi: kabupaten/kota dan provinsi. Informasi lokasi dapat merujuk ke lokasi kantor pusat entitas atau lokasi yang menjadi wilayah kerja KPPN penginput
 - c. Informasi User: KPPN dan Kanwil DJPb yang melakukan input
 - d. Kepemilikan: BUMN/BUMD/Badan Lainnya
 - e. Subsektor GFS: Korporasi Publik Keuangan/Korporasi Publik Non Keuangan/Pemerintah Umum
5. Informasi hasil identifikasi entitas korporasi publik dimaksud kemudian disampaikan ke KPPN untuk menjadi dasar melakukan konfirmasi ke pemerintah daerah dan pengumpulan laporan keuangan BUMD dan Badan Lainnya.

Box 2. Contoh Kasus Identifikasi Entitas ... (lanjutan)**B. Pengelolaan Referensi Entitas**

1. Kanwil DJPb Prov. Gorontalo melakukan identifikasi entitas dari LKPD pemda di wilayah kerja KPPN Marisa. Hasil identifikasi sebagaimana tabel berikut kemudian dikirimkan ke KPPN.

No.	Nama entitas	Pemda
1	PDAM Tirta Moolango Kab Pohuwato	Kab. Pohuwato
2	PT Bank SulutGo	Kab. Boalemo
3	PT Boalemo Idaman Gorontalo	Kab. Boalemo
4	PDAM Tirta Boalemo	Kab. Boalemo

2. Dari identifikasi awal 4 BUMD tersebut, KPPN Marisa melakukan konfirmasi kepada Pemkab Pohuwato dan Pemkab Boalemo mengenai kepemilikan BUMD oleh masing-masing pemda sekaligus mengajukan permohonan atas laporan keuangan BUMD.
3. Pemkab Pohuwato dan Pemkab Boalemo memberikan konfirmasi bahwa PT. Bank SulutGo bukan BUMD Pemkab. Boalemo karena kepemilikannya hanya 4,39% dan tidak didirikan melalui Peraturan Bupati Boalemo, serta tambahan PT Panua Lestari yang merupakan BUMD Pemkab. Pohuwato namun belum teridentifikasi pada SIKRI-KP.

No.	Nama entitas	Konfirmasi	Pemda
1	PDAM Tirta Moolango Kab Pohuwato	Sesuai	Kab. Pohuwato
2	PT Panua Lestari	Tambahan	Kab. Pohuwato
3	PT Bank SulutGo	Tidak Sesuai	Kab. Boalemo
4	PT Boalemo Idaman Gorontalo	Sesuai	Kab. Boalemo
5	PDAM Tirta Boalemo	Sesuai	Kab. Boalemo

4. Dari hasil konfirmasi, KPPN Marisa menyampaikan hasil konfirmasi data entitas kepada Kanwil DJPb Prov Gorontalo dan dilanjutkan merekam PT Panua dan menghapus PT Bank SulutGo pada SIKRI-KP.
5. Kanwil DJPb Prov. Gorontalo menyetujui perekaman referensi entitas PT Panua Lestari dan penghapusan referensi PT Bank SulutGo dari SIKRI-KP berdasarkan informasi KPPN Marisa.

B. PENGUMPULAN DATA

Laporan keuangan entitas yang dibutuhkan merupakan laporan keuangan periode tahunan (audited) yang terdiri dari Neraca atau Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi atau Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya (LRK), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Satu set laporan keuangan lengkap dibutuhkan untuk mendukung informasi pada *face* laporan keuangan dalam rangka proses *mapping* ke LSKP-KP. Dalam hal LPE dan/atau CaLK tidak dapat diperoleh, tahapan input data pada Kertas Kerja dilakukan dengan menggunakan asumsi informasi yang paling mendekati.

Direktorat APK mengumpulkan data laporan keuangan entitas-entitas BUMN dan Entitas Lainnya. KPPN c.q. Seksi Bank mengumpulkan data laporan keuangan entitas-entitas BUMD dan Entitas Lainnya yang dimiliki pemerintah daerah mitra kerja KPPN sesuai hasil identifikasi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal terdapat BUMD dan Entitas Lainnya yang belum memiliki kode entitas, KPPN mengajukan perekaman kode entitas dimaksud kepada Kanwil DJPb untuk dilakukan persetujuan. Proses pengumpulan data dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah berakhirnya periode pelaporan keuangan.

Laporan keuangan yang dikumpulkan dapat berupa *softcopy* atau hasil interkoneksi data antarsistem. Dalam hal laporan keuangan yang

diperoleh berbentuk *hardcopy*, maka dilakukan *scan* untuk kemudian dapat dikirimkan ke Direktorat APK dalam bentuk *softcopy*. Laporan keuangan yang dikumpulkan merupakan laporan yang berstatus *audited*. Namun, dalam hal laporan keuangan yang dikumpulkan berstatus *unaudited*, maka diberikan keterangan mengenai status *unaudited* pada tahapan Input Kertas kerja dan agar dilakukan pemutakhiran saat laporan keuangan *audited* telah tersedia.

C. PENYIAPAN DAN VERIFIKASI DATA

Laporan keuangan entitas yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan input ke dalam SIKRI-KP menggunakan metode-metode berikut:

1. Interkoneksi data antarsistem

Dilakukan dalam hal terdapat kerja sama interkoneksi data antara pihak penyedia sumber data dengan DJPb. Interkoneksi data mengikuti mekanisme yang diatur oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Kementerian Keuangan.

2. Input dan unggah kertas kerja

Input kertas kerja dilakukan atas data laporan keuangan suatu entitas ke dalam kertas kerja yang telah terstandardisasi, untuk selanjutnya diunggah pada SIKRI-KP. Kertas kerja dimaksud, didesain untuk menginput data laporan keuangan satu entitas. Informasi yang diinput ke dalam kertas kerja adalah sekurang-kurangnya sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Komponen Kertas Kerja

Informasi	Input	Keterangan
Identitas entitas	Dipilih sesuai laporan keuangan entitas	-
Periode pelaporan	Dipilih sesuai laporan keuangan entitas	-
Status Laporan Keuangan	Dipilih sesuai laporan keuangan entitas	<i>Audited, Unaudited</i> atau Estimasian
Mata uang pelaporan	Dipilih sesuai laporan keuangan entitas	USD atau IDR
Neraca	Nilai periode pelaporan dan T-1	CoA disusun oleh Direktorat APK
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya	Nilai periode pelaporan	CoA disusun oleh Direktorat APK
Laporan Arus Kas	Nilai periode pelaporan	CoA disusun oleh Direktorat APK
Laporan Perubahan Ekuitas	Nilai periode pelaporan	CoA disusun oleh Direktorat APK

Input dan Unggah Kertas kerja dilakukan oleh Direktorat APK untuk BUMN dan Entitas Lainnya tingkat nasional dan oleh KPPN c.q. Seksi Vera/VeraKI untuk BUMD dan Entitas Lainnya tingkat daerah. Kertas kerja yang telah diinput kemudian dilakukan unggah ke dalam SIKRI-KP. Hasil inputan kemudian tervalidasi secara sistem (kesesuaian identitas entitas, kesesuaian kewenangan input, dan sebagainya) dan secara manual oleh pengguna (kesesuaian angka dengan sumber data laporan keuangan). Proses input data laporan keuangan pada SIKRI-KP dilakukan paling lambat sembilan bulan setelah berakhirnya periode pelaporan keuangan. Adapun

kertas kerja penginputan laporan keuangan entitas pada SIKRI-KP sebagaimana Tabel 4 dan Tabel 5.

**Tabel 4. Kertas Kerja Penginputan Laporan Keuangan Entitas –
Komponen Identitas Entitas**

FORM INPUT LAPORAN KEUANGAN ENTITAS			
Nama Entitas	:	PT BANK SUMATERA UTARA	} Pengguna hanya perlu memilih nama entitas pada dropdown list. Setelah nama entitas dipilih, otomatis akan terisi kepemilikan, sektor usaha, dan jenis mapping
Kode Entitas	:	000149	
Kepemilikan	:	BUMD	
Jenis Mapping	:	KEUANGAN	
Sektor Usaha	:	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI	
Tahun LK	:	2023	→ Pilihan berbentuk dropdown list
Status LK	:	Audited	→ Pilihan berbentuk dropdown list
Mata Uang	:	IDR	→ Pilihan berbentuk dropdown list
Kurs Tengah BI	:	14.278	→ Terisi oleh sistem dari kurs tengah BI di periode pelaporan

**Tabel 5. Kertas Kerja Penginputan Laporan Keuangan Entitas –
Komponen CoA dan Nilai**

	NERACA	Nilai
110101	Kas - dalam Rupiah	...
110102	Kas - dalam mata uang asing	...
110103	Giro pada BI- dalam Rupiah	...
110104	Giro pada BI - dalam mata uang asing	...
110105	Giro pada Bank Lain - dalam Rupiah	...
110106	Giro pada Bank Lain - dalam mata uang asing	...
110107	Tabungan - dalam Rupiah	...
110108	Tabungan - dalam mata uang asing	...
110109	Deposito - dalam Rupiah	...
110110	Deposito - dalam mata uang asing	...
110111	Penempatan pada Bank Lain dan BI - dalam Rupiah	...
110112	Penempatan pada Bank Lain dan BI - dalam mata uang asing	...
110113	Penempatan Dana Anggota Kliring - dalam Rupiah	...
110114	Penempatan Dana Anggota Kliring - dalam mata uang asing	...
110115	Inter-bank Call Money - dalam Rupiah	...

110116	Inter-bank Call Money - dalam mata uang asing	...
<i>Dst.</i>	<i>Dst. (sesuai daftar CoA keuangan)</i>	xxx
<i>Dst.</i>	<i>Dst. (sesuai daftar CoA keuangan)</i>	xxx

Keterangan:

Komponen CoA berisi daftar kode CoA keuangan beserta deskripsi CoA. Kemudian pada kolom Nilai, pengguna menginput nilai CoA sesuai informasi yang diperoleh dari laporan keuangan entitas.

D. MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN GABUNGAN KORPORASI PUBLIK

Laporan Keuangan Gabungan Korporasi Publik Keuangan (LKG-K) dan Laporan Keuangan Gabungan Korporasi Publik Non Keuangan (LKG-NK) disusun oleh Direktorat APK setelah proses input data laporan keuangan selesai. Laporan keuangan yang telah terinput kemudian dilakukan pemisahan menggunakan kode entitas antara korporasi publik keuangan dan korporasi publik Non Keuangan. Pemisahan ini dilakukan untuk menjembatani proses *mapping* ke LSKP-KP.

LKG-K dan LKG-NK memuat informasi berikut:

1. Neraca;
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya;
3. Laporan Arus Kas; dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

LKG-K dan LKG-NK disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar penyusunan LSKP-KP.

METODE ESTIMASI

Direktorat APK melakukan estimasi atas data laporan keuangan entitas korporasi publik yang belum diperoleh. Metode estimasi yang digunakan adalah metode estimasi secara statistik yang berlaku umum.

METODE ELIMINASI

Direktorat APK melakukan identifikasi transaksi resiprokal entitas BUMN dan Entitas Lainnya, sedangkan KPPN melakukan identifikasi transaksi resiprokal entitas BUMD dan Entitas Lainnya di wilayah kerjanya. Identifikasi transaksi resiprokal diperoleh berdasarkan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan, umumnya diungkapkan pada bagian transaksi pihak berelasi dan transaksi pihak ketiga. Hasil identifikasi transaksi resiprokal tersebut selanjutnya diinput pada SIKRI-KP dengan mencantumkan informasi sekurang-kurangnya:

1. Kode Entitas;
2. Entitas Tujuan;
3. Tahun LK;
4. Periode;
5. COA Keuangan; dan
6. Nilai;

E. MEKANISME PENYUSUNAN LSKP KORPORASI PUBLIK

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah sektor Korporasi Publik (LKSP-KP) disusun oleh Direktorat APK melalui proses *mapping* dari laporan keuangan entitas ke dalam akun-akun statistik berdasarkan Manual Statistik Keuangan Pemerintah dan GFS Manual 2014.

LSKP-KP memuat informasi sebagai berikut:

1. Neraca statistik keuangan;
2. Laporan Operasional statistik keuangan;
3. Laporan Arus Ekonomi Lainnya;
4. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas; dan
5. Metadata.

LSKP-KP disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai laporan manajerial pemerintah paling lambat dua belas bulan setelah berakhirnya periode pelaporan keuangan.

PROSES MAPPING

Tahapan *mapping* dilakukan untuk menerjemahkan akun-akun pada CoA laporan keuangan ke dalam GFS yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014. Proses *mapping* pada SIKRI-KP telah difasilitasi sesuai informasi *mapping* pada referensi CoA laporan keuangan. Ketentuan *mapping* dari laporan keuangan entitas ke dalam LSKP-KP secara umum sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Ketentuan Mapping

Laporan Keuangan	Table GFS	LSKP/GFS
Neraca (akhir tahun)	Table 6	Neraca GFS
Selisih Neraca (T - T ⁻¹ - Table 4)	Table 3	Laporan Operasional
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lainnya	Table 1	
	Table 2	
	Table 4	Laporan Arus Ekonomi Lainnya
Laporan Arus Kas	Table 1C	Laporan Sumber dan Penggunaan Kas
	Table 2C	
	Table 3C	

F. PEMUTAKHIRAN DATA

LSKP Korporasi Publik sebagai laporan manajerial diharapkan dapat disajikan sesuai linimasa yang telah ditetapkan, meskipun masih menggunakan data yang bersifat sementara. Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan sekaligus menyediakan *database* yang andal, maka LSKP Korporasi Publik perlu dilakukan pemutakhiran (*updating*) pada periode pelaporan berikutnya sesuai dengan perkembangan status data. Tujuan pemutakhiran data adalah untuk mengumpulkan dan menyajikan data *time series* secara lengkap, rinci, *up-to-date* dan andal sehingga dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan fiskal yang efektif, serta menjaga *history* perubahan data. Pemutakhiran juga dapat digunakan untuk menyusun model analisis dan estimasi data yang lebih akurat.

Pemutakhiran data dilakukan apabila ditemukan kesalahan dan/atau perubahan yang bersifat material pada LSKP Korporasi Publik. Pemutakhiran dilakukan dengan menyusun kembali LSKP Korporasi Publik suatu periode pada periode pelaporan berikutnya, berdasarkan inputan data terkini laporan keuangan entitas BUMN/BUMD/Entitas Lainnya atau berstatus *audited*. LSKP Korporasi Publik pada tahun pertama disusun berdasarkan data Laporan Keuangan *audited* dan *unaudited*, maka berstatus angka sangat sementara. LSKP Korporasi Publik pada tahun kedua yang telah diperbaharui, namun belum seluruhnya berdasarkan data Laporan

Keuangan *audited*, maka berstatus angka sementara. LSKP Korporasi Publik berstatus tetap/final adalah yang berasal dari sumber data laporan keuangan *audited* untuk keseluruhan entitas. Status data keuangan BUMN, BUMD, dan Entitas Lainnya yang digunakan untuk penyusunan LSKP Korporasi Publik adalah sebagaimana Tabel 9.

Tabel 9. Status Data

No	Tanda Bintang (*)	Keterangan	Penjelasan
1	2 Bintang (**)	Angka Sangat Sementara	LSKP Korporasi Publik yang dipublikasikan pada tahun pertama, disusun berdasarkan laporan keuangan entitas yang berhasil dihimpun, baik berstatus <i>Audited</i> maupun <i>Unaudited</i>
2	1 Bintang (*)	Angka Sementara	LSKP Korporasi Publik yang dipublikasikan pada tahun berikutnya, karena adanya pembaharuan data pada laporan keuangan entitas baik atas perubahan status menjadi <i>Audited</i> , atau karena adanya perbaikan atas koreksi
3	Tanpa Bintang	Angka Tetap	LSKP Korporasi Publik yang disusun berdasarkan laporan keuangan entitas yang berstatus <i>Audited</i> seluruhnya

Daftar Akun GFS

Sub-Table Code	Description	CoA GFS	Description
11	<i>Taxes</i>	1111	<i>Payable by individuals</i>
11	<i>Taxes</i>	1112	<i>Payable by corporations and other enterprises</i>
11	<i>Taxes</i>	1113	<i>Unallocable</i>
11	<i>Taxes</i>	112	<i>Taxes on payroll and workforce</i>
11	<i>Taxes</i>	1131	<i>Recurrent taxes on immovable property</i>
11	<i>Taxes</i>	1132	<i>Recurrent taxes on net wealth</i>
11	<i>Taxes</i>	1133	<i>Estate, inheritance, and gift taxes</i>
11	<i>Taxes</i>	1134	<i>Taxes on financial and capital transactions</i>
11	<i>Taxes</i>	1135	<i>Other nonrecurrent taxes on property</i>
11	<i>Taxes</i>	1136	<i>Other recurrent taxes on property</i>
11	<i>Taxes</i>	11411	<i>Value-added taxes</i>
11	<i>Taxes</i>	11412	<i>Sales taxes</i>
11	<i>Taxes</i>	11413	<i>Turnover & other general taxes on G & S</i>
11	<i>Taxes</i>	1142	<i>Excises</i>
11	<i>Taxes</i>	1143	<i>Profits of fiscal monopolies</i>
11	<i>Taxes</i>	1144	<i>Taxes on specific services</i>
11	<i>Taxes</i>	11451	<i>Motor vehicles taxes</i>
11	<i>Taxes</i>	11452	<i>Other</i>
11	<i>Taxes</i>	1146	<i>Other taxes on goods and services</i>
11	<i>Taxes</i>	1151	<i>Customs and other import duties</i>
11	<i>Taxes</i>	1152	<i>Taxes on exports</i>
11	<i>Taxes</i>	1153	<i>Profits of export or import monopolies</i>
11	<i>Taxes</i>	1154	<i>Exchange profits</i>
11	<i>Taxes</i>	1155	<i>Exchange taxes</i>
11	<i>Taxes</i>	1156	<i>Other taxes on international trade and transactions</i>
11	<i>Taxes</i>	116	<i>Other taxes</i>
12	<i>Social Contributions</i>	1211	<i>Employee contributions</i>
12	<i>Social Contributions</i>	1212	<i>Employer contributions</i>
12	<i>Social Contributions</i>	1213	<i>Self-employed or nonemployed contributions</i>
12	<i>Social Contributions</i>	1214	<i>Unallocable contributions</i>
12	<i>Social Contributions</i>	1221	<i>Employee contributions</i>
12	<i>Social Contributions</i>	1222	<i>Employer contributions</i>

12	<i>Social Contributions</i>	1223	<i>Imputed contributions</i>
13	<i>Grants</i>	1311	<i>From Foreign Governments – Current</i>
13	<i>Grants</i>	1312	<i>From Foreign Governments – Capital</i>
13	<i>Grants</i>	1321	<i>From International Governments – Current</i>
13	<i>Grants</i>	1322	<i>From International Governments – Capital</i>
13	<i>Grants</i>	1331	<i>From Other General Governments – Current</i>
13	<i>Grants</i>	1332	<i>From Other General Governments – Capital</i>
14	<i>Other revenue</i>	1411	<i>Interest</i>
14	<i>Other revenue</i>	1412	<i>Dividends</i>
14	<i>Other revenue</i>	1413	<i>Withdrawals from income of quasi-corporations</i>
14	<i>Other revenue</i>	1414	<i>Property income attrib to insurance policyholders</i>
14	<i>Other revenue</i>	1415	<i>Rent</i>
14	<i>Other revenue</i>	1421	<i>Sales of market establishments</i>
14	<i>Other revenue</i>	1422	<i>Administrative fees</i>
14	<i>Other revenue</i>	1423	<i>Incidental sales by nonmarket establishments</i>
14	<i>Other revenue</i>	1424	<i>Imputed sales of goods and services</i>
14	<i>Other revenue</i>	143	<i>Fines, penalties, and forfeits</i>
14	<i>Other revenue</i>	1441	<i>Voluntary transfers other than grants – Current</i>
14	<i>Other revenue</i>	1442	<i>Voluntary transfers other than grants – Capital</i>
14	<i>Other revenue</i>	145	<i>Miscellaneous and unidentified revenue</i>
21	<i>Compensation of employees</i>	211	<i>Wages and salaries</i>
21	<i>Compensation of employees</i>	2121	<i>Actual social contributions</i>
21	<i>Compensation of employees</i>	2122	<i>Imputed social contributions</i>
22	<i>Use of goods and services</i>	22	<i>Use of goods and services</i>
23	<i>Consumption of fixed capital</i>	23	<i>Consumption of fixed capital</i>
24	<i>Interest</i>	241	<i>To nonresidents</i>
24	<i>Interest</i>	242	<i>To residents other than general government</i>
24	<i>Interest</i>	243	<i>To other general government units</i>
25	<i>Subsidies</i>	251	<i>To public corporations</i>
25	<i>Subsidies</i>	252	<i>To private enterprises</i>
26	<i>Grants</i>	2611	<i>To foreign governments – Current</i>

26	<i>Grants</i>	2612	<i>To foreign governments – Capital</i>
26	<i>Grants</i>	2621	<i>To international governments – Current</i>
26	<i>Grants</i>	2622	<i>To international governments – Capital</i>
26	<i>Grants</i>	2631	<i>To other general governments unit – Current</i>
26	<i>Grants</i>	2632	<i>To other general governments unit – Capital</i>
27	<i>Social benefits</i>	271	<i>Social security benefits</i>
27	<i>Social benefits</i>	272	<i>Social assistance benefits</i>
27	<i>Social benefits</i>	273	<i>Employer social benefits</i>
28	<i>Other expense</i>	281	<i>Property expense other than interest</i>
28	<i>Other expense</i>	2821	<i>Miscellaneous other expense – Current</i>
28	<i>Other expense</i>	2822	<i>Miscellaneous other expense – Capital</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3111A	<i>Acquisitions: buildings and structures</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3111B	<i>Disposals: buildings and structures</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3111C	<i>CFC: buildings and structures</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3112A	<i>Acquisitions: machinery and equipment</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3112B	<i>Disposals: machinery and equipment</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3112C	<i>CFC: machinery and equipment</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3113A	<i>Acquisitions: other fixed assets</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3113B	<i>Disposals: other fixed assets</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3113C	<i>CFC: other fixed assets</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3121A	<i>Acquisition: Inventories: Strategic stocks</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3121B	<i>Disposals: Inventories: Strategic stocks</i>

31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3122A	<i>Acquisition: Inventories: Other inventories</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3122B	<i>Disposals: Inventories: Other inventories</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	313A	<i>Acquisitions: valuables</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	313B	<i>Disposals: valuables</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3141A	<i>Acquisitions: land</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3141B	<i>Disposals: land</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3142A	<i>Acquisitions: subsoil assets</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3142B	<i>Disposals: subsoil assets</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3143A	<i>Acquisitions: other naturally occurring assets</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3143B	<i>Disposals: other naturally occurring assets</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3144A	<i>Acquisitions: intangible nonproduced assets</i>
31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	3144B	<i>Disposals: intangible nonproduced assets</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3212A	<i>Disbursements: Domestic – Currency and deposits</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3212B	<i>Repayments: Domestic – Currency and deposits</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3213A	<i>Disbursements: Domestic – Securities other than shares</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3213B	<i>Repayments: Domestic – Securities other than shares</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3214A	<i>Disbursements: Domestic – Loans</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3214B	<i>Repayments: Domestic – Loans</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3215A	<i>Disbursements: Domestic – Shares and other equity</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3215B	<i>Repayments: Domestic – Shares and other equity</i>

32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3216A	<i>Disbursements: Domestic – Insurance technical reserves</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3216B	<i>Repayments: Domestic – Insurance technical reserves</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3217A	<i>Disbursements: Domestic – Financial derivatives</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3217B	<i>Repayments: Domestic – Financial derivatives</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3218A	<i>Disbursements: Domestic – Other accounts receivable</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3218B	<i>Repayments: Domestic – Other accounts receivable</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3221A	<i>Disbursements: Foreign – Currency and deposits</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3221B	<i>Repayments: Foreign – Currency and deposits</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3222A	<i>Disbursements: Foreign – Currency and deposits</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3222B	<i>Repayments: Foreign – Currency and deposits</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3223A	<i>Disbursements: Foreign – Securities other than shares</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3223B	<i>Repayments: Foreign – Securities other than shares</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3224A	<i>Disbursements: Foreign – Loans</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3224B	<i>Repayments: Foreign – Loans</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3225A	<i>Disbursements: Foreign – Shares and other equity</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3225B	<i>Repayments: Foreign – Shares and other equity</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3226A	<i>Disbursements: Foreign – Insurance technical reserves</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3226B	<i>Repayments: Foreign – Insurance technical reserves</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3227A	<i>Disbursements: Foreign – Financial derivatives</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3227B	<i>Repayments: Foreign – Financial derivatives</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3228A	<i>Disbursements: Foreign – Other accounts receivable</i>
32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	3228B	<i>Repayments: Foreign – Other accounts receivable</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3312A	<i>Disbursements: Domestic – Currency and deposits</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3312B	<i>Repayments: Domestic – Currency and deposits</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3313A	<i>Disbursements: Domestic – Securities other than shares</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3313B	<i>Repayments: Domestic – Securities other than shares</i>

33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3314A	<i>Disbursements: Domestic – Loans</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3314B	<i>Repayments: Domestic – Loans</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3315A	<i>Disbursements: Domestic – Shares and other equity</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3315B	<i>Repayments: Domestic – Shares and other equity</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3316A	<i>Disbursements: Domestic – Insurance technical reserves</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3316B	<i>Repayments: Domestic – Insurance technical reserves</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3317A	<i>Disbursements: Domestic – Financial derivatives</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3317B	<i>Repayments: Domestic – Financial derivatives</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3318A	<i>Disbursements: Domestic – Other accounts payable</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3318B	<i>Repayments: Domestic – Other accounts payable</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3321A	<i>Disbursements: Foreign – Currency and deposits</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3321B	<i>Repayments: Foreign – Currency and deposits</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3322A	<i>Disbursements: Foreign – Currency and deposits</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3322B	<i>Repayments: Foreign – Currency and deposits</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3323A	<i>Disbursements: Foreign – Securities other than shares</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3323B	<i>Repayments: Foreign – Securities other than shares</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3324A	<i>Disbursements: Foreign – Loans</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3324B	<i>Repayments: Foreign – Loans</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3325A	<i>Disbursements: Foreign – Shares and other equity</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3325B	<i>Repayments: Foreign – Shares and other equity</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3326A	<i>Disbursements: Foreign – Insurance technical reserves</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3326B	<i>Repayments: Foreign – Insurance technical reserves</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3327A	<i>Disbursements: Foreign – Financial derivatives</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3327B	<i>Repayments: Foreign – Financial derivatives</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3328A	<i>Disbursements: Foreign – Other accounts payable</i>
33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	3328B	<i>Repayments: Foreign – Other accounts payable</i>

41	<i>Nonfinancial assets</i>	4111	<i>Buildings and structures</i>
41	<i>Nonfinancial assets</i>	4112	<i>Machinery and equipment</i>
41	<i>Nonfinancial assets</i>	4113	<i>Other fixed assets</i>
41	<i>Nonfinancial assets</i>	412	<i>Inventories</i>
41	<i>Nonfinancial assets</i>	413	<i>Valuables</i>
41	<i>Nonfinancial assets</i>	4141	<i>Land</i>
41	<i>Nonfinancial assets</i>	4142	<i>Subsoil assets</i>
41	<i>Nonfinancial assets</i>	4143	<i>Other naturally occurring assets</i>
41	<i>Nonfinancial assets</i>	4144	<i>Intangible nonproduced assets</i>
42	<i>Financial assets</i>	4212	<i>Currency and deposits</i>
42	<i>Financial assets</i>	4213	<i>Securities other than shares</i>
42	<i>Financial assets</i>	4214	<i>Loans</i>
42	<i>Financial assets</i>	4215	<i>Shares and other equity</i>
42	<i>Financial assets</i>	4216	<i>Insurance technical reserves</i>
42	<i>Financial assets</i>	4217	<i>Financial derivatives</i>
42	<i>Financial assets</i>	4218	<i>Other accounts receivable</i>
42	<i>Financial assets</i>	4221	<i>Monetary gold and SDRs</i>
42	<i>Financial assets</i>	4222	<i>Currency and deposits</i>
42	<i>Financial assets</i>	4223	<i>Securities other than shares</i>
42	<i>Financial assets</i>	4224	<i>Loans</i>
42	<i>Financial assets</i>	4225	<i>Shares and other equity</i>
42	<i>Financial assets</i>	4226	<i>Insurance technical reserves</i>
42	<i>Financial assets</i>	4227	<i>Financial derivatives</i>
42	<i>Financial assets</i>	4228	<i>Other accounts receivable</i>
43	<i>Liabilities</i>	4312	<i>Currency and deposits</i>
43	<i>Liabilities</i>	4313	<i>Securities other than shares</i>
43	<i>Liabilities</i>	4314	<i>Loans</i>
43	<i>Liabilities</i>	4315	<i>Shares and other equity</i>
43	<i>Liabilities</i>	4316	<i>Insurance technical reserves</i>
43	<i>Liabilities</i>	4317	<i>Financial derivatives</i>
43	<i>Liabilities</i>	4318	<i>Other accounts payable</i>
43	<i>Liabilities</i>	4321	<i>Special Drawing Rights (SDRs)</i>
43	<i>Liabilities</i>	4322	<i>Currency and deposits</i>
43	<i>Liabilities</i>	4323	<i>Securities other than shares</i>
43	<i>Liabilities</i>	4324	<i>Loans</i>
43	<i>Liabilities</i>	4325	<i>Shares and other equity</i>
43	<i>Liabilities</i>	4326	<i>Insurance technical reserves</i>
43	<i>Liabilities</i>	4327	<i>Financial derivatives</i>
43	<i>Liabilities</i>	4328	<i>Other accounts payable</i>
51	<i>Nonfinancial assets</i>	5111	<i>Buildings and structures</i>

51	<i>Nonfinancial assets</i>	5112	<i>Machinery and equipment</i>
51	<i>Nonfinancial assets</i>	5113	<i>Other fixed assets</i>
51	<i>Nonfinancial assets</i>	512	<i>Inventories</i>
51	<i>Nonfinancial assets</i>	513	<i>Valuables</i>
51	<i>Nonfinancial assets</i>	5141	<i>Land</i>
51	<i>Nonfinancial assets</i>	5142	<i>Subsoil assets</i>
51	<i>Nonfinancial assets</i>	5143	<i>Other naturally occurring assets</i>
51	<i>Nonfinancial assets</i>	5144	<i>Intangible nonproduced assets</i>
52	<i>Financial assets</i>	5212	<i>Currency and deposits</i>
52	<i>Financial assets</i>	5213	<i>Securities other than shares</i>
52	<i>Financial assets</i>	5214	<i>Loans</i>
52	<i>Financial assets</i>	5215	<i>Shares and other equity</i>
52	<i>Financial assets</i>	5216	<i>Insurance technical reserves</i>
52	<i>Financial assets</i>	5217	<i>Financial derivatives</i>
52	<i>Financial assets</i>	5218	<i>Other accounts receivable</i>
52	<i>Financial assets</i>	5221	<i>Monetary gold and SDRs</i>
52	<i>Financial assets</i>	5222	<i>Currency and deposits</i>
52	<i>Financial assets</i>	5223	<i>Securities other than shares</i>
52	<i>Financial assets</i>	5224	<i>Loans</i>
52	<i>Financial assets</i>	5225	<i>Shares and other equity</i>
52	<i>Financial assets</i>	5226	<i>Insurance technical reserves</i>
52	<i>Financial assets</i>	5227	<i>Financial derivatives</i>
52	<i>Financial assets</i>	5228	<i>Other accounts receivable</i>
53	<i>Liabilities</i>	5312	<i>Currency and deposits</i>
53	<i>Liabilities</i>	5313	<i>Securities other than shares</i>
53	<i>Liabilities</i>	5314	<i>Loans</i>
53	<i>Liabilities</i>	5315	<i>Shares and other equity</i>
53	<i>Liabilities</i>	5316	<i>Insurance technical reserves</i>
53	<i>Liabilities</i>	5317	<i>Financial derivatives</i>
53	<i>Liabilities</i>	5318	<i>Other accounts payable</i>
53	<i>Liabilities</i>	5321	<i>Special Drawing Rights (SDRs)</i>
53	<i>Liabilities</i>	5322	<i>Currency and deposits</i>
53	<i>Liabilities</i>	5323	<i>Securities other than shares</i>
53	<i>Liabilities</i>	5324	<i>Loans</i>
53	<i>Liabilities</i>	5325	<i>Shares and other equity</i>
53	<i>Liabilities</i>	5326	<i>Insurance technical reserves</i>
53	<i>Liabilities</i>	5327	<i>Financial derivatives</i>
53	<i>Liabilities</i>	5328	<i>Other accounts payable</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1111	<i>Payable by individuals</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1112	<i>Payable by corporations and other enterprises</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1113	<i>Unallocable</i>

C11	<i>Taxes</i>	C112	<i>Taxes on payroll and workforce</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1131	<i>Recurrent taxes on immovable property</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1132	<i>Recurrent taxes on net wealth</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1133	<i>Estate, inheritance, and gift taxes</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1134	<i>Taxes on financial and capital transactions</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1135	<i>Other nonrecurrent taxes on property</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1136	<i>Other recurrent taxes on property</i>
C11	<i>Taxes</i>	C11411	<i>Value-added taxes</i>
C11	<i>Taxes</i>	C11412	<i>Sales taxes</i>
C11	<i>Taxes</i>	C11413	<i>Turnover & other general taxes on G & S</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1142	<i>Excises</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1143	<i>Profits of fiscal monopolies</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1144	<i>Taxes on specific services</i>
C11	<i>Taxes</i>	C11451	<i>Motor vehicles taxes</i>
C11	<i>Taxes</i>	C11452	<i>Other</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1146	<i>Other taxes on goods and services</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1151	<i>Customs and other import duties</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1152	<i>Taxes on exports</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1153	<i>Profits of export or import monopolies</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1154	<i>Exchange profits</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1155	<i>Exchange taxes</i>
C11	<i>Taxes</i>	C1156	<i>Other taxes on international trade and transactions</i>
C11	<i>Taxes</i>	C116	<i>Other taxes</i>
C12	<i>Social Contributions</i>	C1211	<i>Employee contributions</i>
C12	<i>Social Contributions</i>	C1212	<i>Employer contributions</i>
C12	<i>Social Contributions</i>	C1213	<i>Self-employed or nonemployed contributions</i>
C12	<i>Social Contributions</i>	C1214	<i>Unallocable contributions</i>
C12	<i>Social Contributions</i>	C1221	<i>Employee contributions</i>
C12	<i>Social Contributions</i>	C1222	<i>Employer contributions</i>
C12	<i>Social Contributions</i>	C1223	<i>Imputed contributions</i>
C13	<i>Grants</i>	C1311	<i>From Foreign Governments – Current</i>
C13	<i>Grants</i>	C1312	<i>From Foreign Governments – Capital</i>
C13	<i>Grants</i>	C1321	<i>From International Governments – Current</i>
C13	<i>Grants</i>	C1322	<i>From International Governments – Capital</i>

C13	<i>Grants</i>	C1331	<i>From Other General Governments – Current</i>
C13	<i>Grants</i>	C1332	<i>From Other General Governments – Capital</i>
C14	<i>Other revenue</i>	C1411	<i>Interest</i>
C14	<i>Other revenue</i>	C1412	<i>Dividends</i>
C14	<i>Other revenue</i>	C1413	<i>Withdrawals from income of quasi-corporations</i>
C14	<i>Other revenue</i>	C1414	<i>Property income attrib to insurance policyholders</i>
C14	<i>Other revenue</i>	C1415	<i>Rent</i>
C14	<i>Other revenue</i>	C1421	<i>Sales of market establishments</i>
C14	<i>Other revenue</i>	C1422	<i>Administrative fees</i>
C14	<i>Other revenue</i>	C1423	<i>Incidental sales by nonmarket establishments</i>
C14	<i>Other revenue</i>	C1424	<i>Imputed sales of goods and services</i>
C14	<i>Other revenue</i>	C143	<i>Fines, penalties, and forfeits</i>
C14	<i>Other revenue</i>	C1441	<i>Voluntary transfers other than grants – Current</i>
C14	<i>Other revenue</i>	C1442	<i>Voluntary transfers other than grants – Capital</i>
C14	<i>Other revenue</i>	C145	<i>Miscellaneous and unidentified revenue</i>
C21	<i>Compensation of employees</i>	C211	<i>Wages and salaries</i>
C21	<i>Compensation of employees</i>	C2121	<i>Actual social contributions</i>
C21	<i>Compensation of employees</i>	C2122	<i>Imputed social contributions</i>
C22	<i>Use of goods and services</i>	C22	<i>Use of goods and services</i>
C23	<i>Consumption of fixed capital</i>	C23	<i>Consumption of fixed capital</i>
C24	<i>Interest</i>	C241	<i>To nonresidents</i>
C24	<i>Interest</i>	C242	<i>To residents other than general government</i>
C24	<i>Interest</i>	C243	<i>To other general government units</i>
C25	<i>Subsidies</i>	C251	<i>To public corporations</i>
C25	<i>Subsidies</i>	C252	<i>To private enterprises</i>
C26	<i>Grants</i>	C2611	<i>To foreign governments – Current</i>
C26	<i>Grants</i>	C2612	<i>To foreign governments – Capital</i>
C26	<i>Grants</i>	C2621	<i>To international governments – Current</i>
C26	<i>Grants</i>	C2622	<i>To international governments – Capital</i>
C26	<i>Grants</i>	C2631	<i>To other general governments unit – Current</i>
C26	<i>Grants</i>	C2632	<i>To other general governments unit – Capital</i>
C27	<i>Social benefits</i>	C271	<i>Social security benefits</i>

C27	<i>Social benefits</i>	C272	<i>Social assistance benefits</i>
C27	<i>Social benefits</i>	C273	<i>Employer social benefits</i>
C28	<i>Other expense</i>	C281	<i>Property expense other than interest</i>
C28	<i>Other expense</i>	C2821	<i>Miscellaneous other expense – Current</i>
C28	<i>Other expense</i>	C2822	<i>Miscellaneous other expense – Capital</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3111A	<i>Acquisitions: buildings and structures</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3111B	<i>Disposals: buildings and structures</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3111C	<i>CFC: buildings and structures</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3112A	<i>Acquisitions: machinery and equipment</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3112B	<i>Disposals: machinery and equipment</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3112C	<i>CFC: machinery and equipment</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3113A	<i>Acquisitions: other fixed assets</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3113B	<i>Disposals: other fixed assets</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3113C	<i>CFC: other fixed assets</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3121A	<i>Transactions - Acquisition: Inventories: Strategic stocks</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3121B	<i>Transactions - Disposals: Inventories: Strategic stocks</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3122A	<i>Transactions - Acquisition: Inventories: Other inventories</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3122B	<i>Transactions - Disposals: Inventories: Other inventories</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C313A	<i>Acquisitions: valuables</i>

C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C313B	<i>Disposals: valuables</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3141A	<i>Acquisitions: land</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3141B	<i>Disposals: land</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3142A	<i>Acquisitions: subsoil assets</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3142B	<i>Disposals: subsoil assets</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3143A	<i>Acquisitions: other naturally occurring assets</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3143B	<i>Disposals: other naturally occurring assets</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3144A	<i>Acquisitions: intangible nonproduced assets</i>
C31	<i>Net acquisition of nonfinancial assets</i>	C3144B	<i>Disposals: intangible nonproduced assets</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3212A	<i>Disbursements : Domestic – Currency and deposits</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3212B	<i>Repayments: Domestic – Currency and deposits</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3213A	<i>Disbursements: Domestic – Securities other than shares</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3213B	<i>Repayments: Domestic – Securities other than shares</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3214A	<i>Disbursements: Domestic – Loans</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3214B	<i>Repayments : Domestic – Loans</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3215A	<i>Disbursements: Domestic – Shares and other equity</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3215B	<i>Repayments: Domestic – Shares and other equity</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3216A	<i>Disbursements: Domestic – Insurance technical reserves</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3216B	<i>Repayments: Domestic – Insurance technical reserves</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3217A	<i>Disbursements: Domestic – Financial derivatives</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3217B	<i>Repayments: Domestic – Financial derivatives</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3218A	<i>Disbursements: Domestic – Other accounts receivable</i>

C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3218B	<i>Repayments: Domestic – Other accounts receivable</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3221A	<i>Disbursements: Foreign – Currency and deposits</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3221B	<i>Repayments: Foreign – Currency and deposits</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3222A	<i>Disbursements: Foreign – Currency and deposits</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3222B	<i>Repayments: Foreign – Currency and deposits</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3223A	<i>Disbursements: Foreign – Securities other than shares</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3223B	<i>Repayments: Foreign – Securities other than shares</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3224A	<i>Disbursements: Foreign – Loans</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3224B	<i>Repayments: Foreign – Loans</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3225A	<i>Disbursements: Foreign – Shares and other equity</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3225B	<i>Repayments: Foreign – Shares and other equity</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3226A	<i>Disbursements: Foreign – Insurance technical reserves</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3226B	<i>Repayments: Foreign – Insurance technical reserves</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3227A	<i>Disbursements: Foreign – Financial derivatives</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3227B	<i>Repayments: Foreign – Financial derivatives</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3228A	<i>Disbursements: Foreign – Other accounts receivable</i>
C32	<i>Net acquisition of financial assets</i>	C3228B	<i>Repayments: Foreign – Other accounts receivable</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3312A	<i>Disbursements: Domestic – Currency and deposits</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3312B	<i>Repayments: Domestic – Currency and deposits</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3313A	<i>Disbursements: Domestic – Securities other than shares</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3313B	<i>Repayments: Domestic – Securities other than shares</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3314A	<i>Disbursements: Domestic – Loans</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3314B	<i>Repayments: Domestic – Loans</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3315A	<i>Disbursements: Domestic – Shares and other equity</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3315B	<i>Repayments: Domestic – Shares and other equity</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3316A	<i>Disbursements: Domestic – Insurance technical reserves</i>

C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3316B	<i>Repayments: Domestic – Insurance technical reserves</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3317A	<i>Disbursements: Domestic – Financial derivatives</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3317B	<i>Repayments: Domestic – Financial derivatives</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3318A	<i>Disbursements: Domestic – Other accounts payable</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3318B	<i>Repayments: Domestic – Other accounts payable</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3321A	<i>Disbursements: Foreign – Currency and deposits</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3321B	<i>Repayments: Foreign – Currency and deposits</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3322A	<i>Disbursements: Foreign – Currency and deposits</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3322B	<i>Repayments: Foreign – Currency and deposits</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3323A	<i>Disbursements: Foreign – Securities other than shares</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3323B	<i>Repayments: Foreign – Securities other than shares</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3324A	<i>Disbursements: Foreign – Loans</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3324B	<i>Repayments: Foreign – Loans</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3325A	<i>Disbursements: Foreign – Shares and other equity</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3325B	<i>Repayments: Foreign – Shares and other equity</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3326A	<i>Disbursements: Foreign – Insurance technical reserves</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3326B	<i>Repayments: Foreign – Insurance technical reserves</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3327A	<i>Disbursements: Foreign – Financial derivatives</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3327B	<i>Repayments: Foreign – Financial derivatives</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3328A	<i>Disbursements: Foreign – Other accounts payable</i>
C33	<i>Net incurrence of liabilities</i>	C3328B	<i>Repayments: Foreign – Other accounts payable</i>
61	<i>Nonfinancial assets</i>	6111	<i>Buildings and structures</i>
61	<i>Nonfinancial assets</i>	6112	<i>Machinery and equipment</i>
61	<i>Nonfinancial assets</i>	6113	<i>Other fixed assets</i>
61	<i>Nonfinancial assets</i>	612	<i>Inventories</i>
61	<i>Nonfinancial assets</i>	613	<i>Valuables</i>

61	<i>Nonfinancial assets</i>	6141	<i>Land</i>
61	<i>Nonfinancial assets</i>	6142	<i>Subsoil assets</i>
61	<i>Nonfinancial assets</i>	6143	<i>Other naturally occurring assets</i>
61	<i>Nonfinancial assets</i>	6144	<i>Intangible nonproduced assets</i>
62	<i>Financial assets</i>	6212	<i>Currency and deposits</i>
62	<i>Financial assets</i>	6213	<i>Securities other than shares</i>
62	<i>Financial assets</i>	6214	<i>Loans</i>
62	<i>Financial assets</i>	6215	<i>Shares and other equity</i>
62	<i>Financial assets</i>	6216	<i>Insurance technical reserves</i>
62	<i>Financial assets</i>	6217	<i>Financial derivatives</i>
62	<i>Financial assets</i>	6218	<i>Other accounts receivable</i>
62	<i>Financial assets</i>	6221	<i>Monetary gold and SDRs</i>
62	<i>Financial assets</i>	6222	<i>Currency and deposits</i>
62	<i>Financial assets</i>	6223	<i>Securities other than shares</i>
62	<i>Financial assets</i>	6224	<i>Loans</i>
62	<i>Financial assets</i>	6225	<i>Shares and other equity</i>
62	<i>Financial assets</i>	6226	<i>Insurance technical reserves</i>
62	<i>Financial assets</i>	6227	<i>Financial derivatives</i>
62	<i>Financial assets</i>	6228	<i>Other accounts receivable</i>
63	<i>Liabilities</i>	6312	<i>Currency and deposits</i>
63	<i>Liabilities</i>	6313	<i>Securities other than shares</i>
63	<i>Liabilities</i>	6314	<i>Loans</i>
63	<i>Liabilities</i>	6315	<i>Shares and other equity</i>
63	<i>Liabilities</i>	6316	<i>Insurance technical reserves</i>
63	<i>Liabilities</i>	6317	<i>Financial derivatives</i>
63	<i>Liabilities</i>	6318	<i>Other accounts payable</i>
63	<i>Liabilities</i>	6321	<i>Special Drawing Rights (SDRs)</i>
63	<i>Liabilities</i>	6322	<i>Currency and deposits</i>
63	<i>Liabilities</i>	6323	<i>Securities other than shares</i>
63	<i>Liabilities</i>	6324	<i>Loans</i>
63	<i>Liabilities</i>	6325	<i>Shares and other equity</i>
63	<i>Liabilities</i>	6326	<i>Insurance technical reserves</i>
63	<i>Liabilities</i>	6327	<i>Financial derivatives</i>
63	<i>Liabilities</i>	6328	<i>Other accounts payable</i>
91	<i>Nonfinancial assets</i>	9111	<i>Buildings and structures</i>
91	<i>Nonfinancial assets</i>	9112	<i>Machinery and equipment</i>
91	<i>Nonfinancial assets</i>	9113	<i>Other fixed assets</i>
91	<i>Nonfinancial assets</i>	912	<i>Inventories</i>
91	<i>Nonfinancial assets</i>	913	<i>Valuables</i>
91	<i>Nonfinancial assets</i>	9141	<i>Land</i>

91	<i>Nonfinancial assets</i>	9142	<i>Subsoil assets</i>
91	<i>Nonfinancial assets</i>	9143	<i>Other naturally occurring assets</i>
91	<i>Nonfinancial assets</i>	9144	<i>Intangible nonproduced assets</i>
92	<i>Financial assets</i>	9212	<i>Currency and deposits</i>
92	<i>Financial assets</i>	9213	<i>Securities other than shares</i>
92	<i>Financial assets</i>	9214	<i>Loans</i>
92	<i>Financial assets</i>	9215	<i>Shares and other equity</i>
92	<i>Financial assets</i>	9216	<i>Insurance technical reserves</i>
92	<i>Financial assets</i>	9217	<i>Financial derivatives</i>
92	<i>Financial assets</i>	9218	<i>Other accounts receivable</i>
92	<i>Financial assets</i>	9221	<i>Monetary gold and SDRs</i>
92	<i>Financial assets</i>	9222	<i>Currency and deposits</i>
92	<i>Financial assets</i>	9223	<i>Securities other than shares</i>
92	<i>Financial assets</i>	9224	<i>Loans</i>
92	<i>Financial assets</i>	9225	<i>Shares and other equity</i>
92	<i>Financial assets</i>	9226	<i>Insurance technical reserves</i>
92	<i>Financial assets</i>	9227	<i>Financial derivatives</i>
92	<i>Financial assets</i>	9228	<i>Other accounts receivable</i>
93	<i>Liabilities</i>	9312	<i>Currency and deposits</i>
93	<i>Liabilities</i>	9313	<i>Securities other than shares</i>
93	<i>Liabilities</i>	9314	<i>Loans</i>
93	<i>Liabilities</i>	9315	<i>Shares and other equity</i>
93	<i>Liabilities</i>	9316	<i>Insurance technical reserves</i>
93	<i>Liabilities</i>	9317	<i>Financial derivatives</i>
93	<i>Liabilities</i>	9318	<i>Other accounts payable</i>
93	<i>Liabilities</i>	9321	<i>Special Drawing Rights (SDRs)</i>
93	<i>Liabilities</i>	9322	<i>Currency and deposits</i>
93	<i>Liabilities</i>	9323	<i>Securities other than shares</i>
93	<i>Liabilities</i>	9324	<i>Loans</i>
93	<i>Liabilities</i>	9325	<i>Shares and other equity</i>
93	<i>Liabilities</i>	9326	<i>Insurance technical reserves</i>
93	<i>Liabilities</i>	9327	<i>Financial derivatives</i>
93	<i>Liabilities</i>	9328	<i>Other accounts payable</i>

Chart of Account Korporasi Publik*)

No	Kode Akun	Nama Akun	Deskripsi dan Rincian Akun
1	110101	Kas - <i>in Local Currency</i>	Uang tunai yang dimiliki entitas dalam rupiah yang tidak dibatasi penggunaannya
2	110102	Kas - <i>in Foreign Currency</i>	Uang tunai yang dimiliki entitas dalam mata uang asing yang tidak dibatasi penggunaannya
3	110103	Giro pada Bank Indonesia - <i>in Local Currency</i>	Dana dalam bentuk giro yang ditempatkan entitas di Bank Indonesia dalam rupiah yang tidak dibatasi penggunaannya
4	110104	Giro pada Bank Indonesia - <i>in Foreign Currency</i>	Dana dalam bentuk giro yang ditempatkan entitas di Bank Indonesia mata uang asing yang tidak dibatasi penggunaannya
5	110105	Giro pada Bank Lain - <i>in Local Currency</i>	Dana dalam bentuk giro yang ditempatkan entitas di Bank Lain (selain BI) dalam rupiah tidak dibatasi penggunaannya
6	110106	Giro pada Bank Lain - <i>in Foreign Currency</i>	Dana dalam bentuk giro yang ditempatkan entitas di Bank Lain (selain BI) dalam mata uang asing tidak dibatasi penggunaannya
7	110107	Tabungan - <i>in Local Currency</i>	Dana dalam bentuk tabungan yang ditempatkan entitas di Bank dalam rupiah yang tidak dibatasi penggunaannya
8	110108	Tabungan - <i>in Foreign Currency</i>	Dana dalam bentuk tabungan yang ditempatkan entitas di Bank dalam mata uang asing yang tidak dibatasi penggunaannya
9	110109	Deposito/Deposito Berjangka - <i>in Local Currency</i>	Seluruh deposito ditempatkan entitas di Bank dalam rupiah tidak dibatasi penggunaannya
10	110110	Deposito/Deposito Berjangka - <i>in Foreign Currency</i>	Seluruh deposito ditempatkan entitas di Bank dalam mata uang asing yang tidak dibatasi penggunaannya
11	110111	Penempatan pada Bank Lain dan BI - <i>in Local Currency</i>	Dana dalam bentuk selain giro, tabungan, dan deposito yang ditempatkan entitas di Bank Lain dan Bank Indonesia dalam rupiah tidak dibatasi penggunaannya
12	110112	Penempatan pada Bank Lain dan BI - <i>in Foreign Currency</i>	Dana dalam bentuk selain giro, tabungan, dan deposito yang ditempatkan entitas di Bank Lain dan Bank Indonesia dalam

			mata uang asing yang tidak dibatasi penggunaannya
13	110113	Penempatan Dana Anggota Kliring - <i>in Local Currency</i>	Dana simpanan masing-masing anggota kliring yang ditempatkan dalam instrumen deposito dan giro, yang disajikan dalam mata uang rupiah
14	110114	Penempatan Dana Anggota Kliring - <i>in Foreign Currency</i>	Dana simpanan masing-masing anggota kliring yang ditempatkan dalam instrumen deposito dan giro, yang disajikan dalam mata uang asing
15	110115	Inter-bank Call Money - <i>in Local Currency</i>	Pinjaman antar bank dalam proses kliring yang dilakukan entitas dalam mata uang rupiah yang tidak dibatasi penggunaannya
16	110116	Inter-bank Call Money - <i>in Foreign Currency</i>	Pinjaman antar bank dalam proses kliring yang dilakukan entitas dalam mata uang asing yang tidak dibatasi penggunaannya
17	110201	Piutang Premi dan Iuran-Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Piutang premi dan iuran yang dimiliki entitas berupa tagihan premi dan iuran yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh tertanggung dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
18	110202	Piutang Premi dan Iuran-Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang premi dan iuran yang dimiliki entitas berupa tagihan premi dan iuran yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh tertanggung dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
19	110203	Piutang Asuransi, Reasuransi, dan Retrosesi - Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Piutang asuransi, reasuransi, dan retrosesi yang dimiliki entitas yang telah jatuh tempo dan belum dibayar dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
20	110204	Piutang Asuransi, Reasuransi, dan Retrosesi - Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang asuransi, reasuransi, dan retrosesi yang dimiliki entitas yang telah jatuh tempo dan belum dibayar dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah asing
21	110205	Aset Reasuransi - Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Aset reasuransi yang dimiliki entitas berupa tagihan kepada reasuradur terkait klaim reasuransi yang telah jatuh

			tempo dan belum dibayar dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
22	110206	Aset Reasuransi - Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Aset reasuransi yang dimiliki entitas berupa tagihan kepada reasuradur terkait klaim reasuransi yang telah jatuh tempo dan belum dibayar dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
23	110207	Piutang Hasil Investasi - Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Piutang hasil investasi yang dimiliki entitas berupa tagihan hasil investasi industri asuransi yang belum diterima dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah. Dapat juga digunakan untuk mencatat piutang atas pelepasan investasi.
24	110208	Piutang Hasil Investasi - Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang hasil investasi yang dimiliki entitas berupa tagihan hasil investasi industri asuransi yang belum diterima dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing. Dapat juga digunakan untuk mencatat piutang atas pelepasan investasi.
25	110209	Piutang Pembiayaan dan Sewa Pembiayaan - Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Piutang yang dimiliki entitas berupa piutang pembiayaan dan tagihan dari perjanjian sewa pembiayaan (yaitu sewa yang menyebabkan perpindahan kepemilikan atas aset) yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
26	110210	Piutang Pembiayaan dan Sewa Pembiayaan - Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang yang dimiliki entitas berupa piutang pembiayaan dan tagihan dari perjanjian sewa pembiayaan (yaitu sewa yang menyebabkan perpindahan kepemilikan atas aset) yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
27	110211	Tagihan Anjak Piutang - Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Tagihan anjak piutang yang dimiliki entitas yang jatuh tempo dalam 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah

28	110212	Tagihan Anjak Piutang - Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Tagihan anjak piutang yang dimiliki entitas yang jatuh tempo dalam 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
29	110213	Piutang Sewa Operasi - Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Piutang sewa yang dimiliki entitas berupa tagihan dari perjanjian sewa operasi (yaitu sewa yang tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan atas aset) yang jatuh tempo dalam 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
30	110214	Piutang Sewa Operasi - Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang sewa yang dimiliki entitas berupa tagihan dari perjanjian sewa operasi (yaitu sewa yang tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan atas aset) yang jatuh tempo dalam 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
31	110215	Piutang Retensi - Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Piutang retensi dimiliki entitas yang merupakan jaminan kepada <i>customer</i> yang dapat ditagih jika proyek telah terselesaikan, yang jatuh tempo dalam 12 bulan dan dicatat dalam mata uang rupiah
32	110216	Piutang Retensi - Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang retensi dimiliki entitas yang merupakan jaminan kepada <i>customer</i> yang dapat ditagih jika proyek telah terselesaikan, yang jatuh tempo dalam 12 bulan dan dicatat dalam mata uang asing
33	110217	Tagihan Bruto kepada Pelanggan - Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Tagihan bruto yang dimiliki entitas berupa tagihan bruto kepada pelanggan yang dapat ditagih ketika pekerjaan masih dalam pelaksanaan yang diakui sebagai selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi jumlah kerugian dan termin yang diakui yang jatuh tempo dalam 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
34	110218	Tagihan Bruto kepada Pelanggan - Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Tagihan bruto yang dimiliki entitas berupa tagihan bruto kepada pelanggan yang dapat ditagih ketika pekerjaan masih dalam pelaksanaan yang diakui sebagai selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang

			diakui dikurangi jumlah kerugian dan termin yang diakui yang jatuh tempo dalam 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
35	110219	Piutang <i>Past Service Liabilities</i> (PSL) Pemberi Kerja - Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Piutang kepada perusahaan dana pensiun dalam Program Pesangon memperhitungkan masa kerja yang telah terbentuk (masa kerja lampau) dari karyawan pada saat Program Pesangon diadakan oleh Perusahaan, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dan dicatat dalam mata uang rupiah
36	110220	Piutang <i>Past Service Liabilities</i> (PSL) Pemberi Kerja - Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang kepada perusahaan dana pensiun dalam Program Pesangon memperhitungkan masa kerja yang telah terbentuk (masa kerja lampau) dari karyawan pada saat Program Pesangon diadakan oleh Perusahaan, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dan dicatat dalam mata uang asing
37	110221	Piutang Usaha/Jasa/Penjualan - Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Tagihan kepada pihak lain yang muncul dari kegiatan usaha/jasa/penjualan yang jatuh tempo dalam 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
38	110222	Piutang Usaha/Jasa/Penjualan - Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Tagihan kepada pihak lain yang muncul dari kegiatan usaha/jasa/penjualan yang jatuh tempo dalam 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
39	110223	Piutang Ventura Bersama dan Kerjasama Operasi - Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Piutang ventura yang dimiliki entitas berupa piutang ventura bersama dan kerjasama operasi yang jatuh tempo dalam 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
40	110224	Piutang Ventura Bersama dan Kerjasama Operasi - Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang ventura yang dimiliki entitas berupa piutang ventura bersama dan kerjasama operasi yang jatuh tempo dalam 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
41	110225	Piutang kepada Pemerintah - Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Piutang Pemerintah dimiliki entitas berupa piutang/tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia selain subsidi dan/atau kompensasi yang jatuh tempo dalam 12 bulan,

			dicatat dalam mata uang rupiah
42	110226	Piutang kepada Pemerintah - Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang Pemerintah dimiliki entitas berupa piutang/ tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia selain subsidi dan/atau kompensasi yang jatuh tempo dalam 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
43	110227	Piutang Premi Pensiun - <i>in Local Currency</i>	Piutang premi yang dimiliki entitas berupa tagihan premi pensiun kepada perusahaan asuransi yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh tertanggung dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
44	110228	Piutang Premi Pensiun - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang premi yang dimiliki entitas berupa tagihan premi pensiun kepada perusahaan asuransi yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh tertanggung dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
45	110229	Piutang Lainnya - Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Piutang lainnya di luar piutang usaha berkaitan kegiatan operasional perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
46	110230	Piutang Lainnya - Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang lainnya di luar piutang usaha yang berkaitan kegiatan operasional perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
47	110231	Cadangan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar - <i>in Local Currency</i>	Cadangan penyisihan piutang tak tertagih yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari akun piutang dan diperlakukan sebagai akun kontra piutang di neraca, yang jatuh tempo dalam 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
48	110232	Cadangan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar - <i>in Foreign Currency</i>	Cadangan penyisihan piutang tak tertagih yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari akun piutang dan diperlakukan sebagai akun kontra piutang di neraca, yang jatuh tempo dalam 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing

49	110301	Persediaan - Bahan Baku	Aset yang tersedia yang dimiliki entitas berupa bahan baku yang dibeli dari entitas lain untuk digunakan dalam operasi produksi.
50	110302	Persediaan - WIP	Aset tersedia dimiliki entitas berupa barang setengah jadi yang membutuhkan kerja tambahan/ proses lanjutan sebelum menjadi barang jadi.
51	110303	Persediaan - Barang Jadi	Aset tersedia untuk dijual yang dimiliki entitas berupa barang yang telah selesai proses produksinya tetapi belum dijual oleh entitas, dan masih berada di dalam gudang
52	110304	Persediaan - Umum dan Lainnya	Aset yang tersedia berupa persediaan Umum dan Lainnya selain bahan baku, <i>work in process</i> , dan barang jadi
53	110305	Persediaan Emas	Aset yang tersedia berupa emas, cadangan emas di BI dan termasuk juga persediaan berupa hasil tambang yang berharga
54	110401	Pajak Dibayar di Muka - Bagian Lancar	Pajak dibayarkan oleh entitas setiap bulan dipotong/ dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun (PPH) atau akhir bulan (PPN). Pajak dibayar dimuka dikelompokkan atas 3 bagian: 1) Pajak penghasilan 2) Pajak pertambahan nilai 3) Pajak dalam proses restitusi - meliputi PPh atau PPN yang telah diajukan untuk direstitusi atau sedang dalam proses restitusi, dengan waktu jatuh tempo dalam 12 bulan
55	110402	Biaya Dibayar di Muka - <i>In Local Currency</i> - Bagian Lancar	Biaya yang dibayarkan sebelum menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa dalam 12 bulan, yang disajikan dalam mata uang rupiah
56	110403	Biaya Dibayar di Muka - <i>In Foreign Currency</i> - Bagian Lancar	Biaya dibayarkan sebelum menggunakan/memanfaatkan barang atau jasa dalam 12 bulan, disajikan dalam mata uang asing
57	110404	Uang Muka - Bagian Lancar	Sejumlah uang dibayarkan di awal atas transaksi tertentu,

			biasanya pada pembelian kredit barang dengan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
58	110524	Aset Biologik - Lancar	Hewan atau tanaman hidup, termasuk pula didalamnya produk yang tumbuh pada tanaman produktif
59	110501	Aset Non-Keuangan yang Dimiliki untuk Dijual	Aset tidak diperdagangkan di pasar keuangan yang nilainya berasal dari aset fisiknya dengan tujuan dimiliki untuk dijual, dan mempunyai masa manfaat 12 bulan
60	110523	Aset Keuangan tersedia untuk dijual	Aset tidak berwujud fisik namun bisa diukur layaknya aset riil karena setara dengan nilai uang, yang mempunyai masa manfaat 12 bulan
61	110502	Kas yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya dan tidak dapat digunakan secara bebas, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
62	110503	Kas yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya dan tidak dapat digunakan secara bebas, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
63	110504	Giro yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Kas Rekening Giro telah ditentukan penggunaannya dan tidak dapat digunakan secara bebas, jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
64	110505	Giro yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Kas Rekening Giro telah ditentukan penggunaannya dan tidak dapat digunakan secara bebas, jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
65	110506	Tabungan yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Tabungan telah ditentukan penggunaannya dan tidak digunakan secara bebas, jatuh tempo waktu 12 bulan, dicatat mata uang rupiah. Investasi ini dalam bentuk berupa Simpanan Koperasi JAMKRIDA JAKARTA, diklasifikasikan di akun ini

66	110507	Tabungan yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Tabungan telah ditentukan penggunaannya dan tidak dapat digunakan secara bebas, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing. Investasi berupa Simpanan Koperasi JAMKRIDA JAKARTA, diklasifikasikan di akun ini
67	110508	Deposito yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Kas berupa Deposito yang telah ditentukan penggunaannya dan tidak dapat digunakan secara bebas, jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah. Investasi Jangka Pendek pada SIG yang tidak ada rinciannya, diklasifikasikan ke akun ini
68	110509	Deposito yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Kas berupa Deposito telah ditentukan penggunaannya dan tidak dapat digunakan secara bebas, jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing. Investasi Jangka Pendek pada SIG yang tidak ada rinciannya, diklasifikasikan ke akun ini
69	110510	Inter-bank <i>Call Money</i> yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Tagihan atas transaksi pinjam-meminjam dana antar bank dalam proses kliring yang dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dan dicatat dalam mata uang rupiah
70	110511	Inter-bank <i>Call Money</i> yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Tagihan atas transaksi pinjam-meminjam dana antar bank dalam proses kliring yang dibatasi penggunaannya, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dan dicatat dalam mata uang asing
71	110512	Penempatan pada Bank Lain dan BI yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Kas di Rekening Penempatan pada Bank Lain dan BI, telah ditentukan penggunaannya dan tidak dapat digunakan secara bebas, jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dan dicatat dalam mata uang rupiah
72	110513	Penempatan pada Bank Lain dan BI yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Kas di Rekening Penempatan pada Bank Lain dan BI, telah ditentukan penggunaannya dan tidak dapat digunakan secara bebas, yang jatuh tempo dalam

			waktu 12 bulan dan dicatat dalam mata uang asing
73	110514	Pendapatan yang Masih Akan Diterima - <i>In Local Currency</i> - Bagian Lancar	Aset lancar lain yang dimiliki entitas berupa pendapatan yang masih akan diterima dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, dicatat dalam mata uang rupiah
74	110515	Pendapatan yang Masih Akan Diterima - <i>In Foreign Currency</i> - Bagian Lancar	Aset lancar lain yang dimiliki entitas berupa pendapatan yang masih akan diterima dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, dicatat dalam mata uang asing
75	110516	Setoran Jaminan - Bagian Lancar	Sejumlah uang dibayarkan ke bank sebagai jaminan yang nantinya akan diperhitungkan saat penyelesaian suatu transaksi, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
76	110517	Pinjaman Polis - Bagian Lancar	Dana yang dipinjamkan kepada peserta pensiun dengan jangka waktu 12 bulan
77	110518	Perlengkapan - Bagian Lancar	Aset berupa perlengkapan/ bahan habis pakai mempunyai masa manfaat 12 bulan
78	110519	Tagihan Derivatif - <i>in Local Currency</i>	Tagihan merupakan potensi keuntungan yang timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi <i>spot</i> dan derivatif pada tanggal laporan yang dimiliki entitas, yang disajikan dalam mata uang rupiah
79	110520	Tagihan Derivatif - <i>in Foreign Currency</i>	Tagihan yang merupakan potensi keuntungan timbul dari selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar dari suatu transaksi <i>spot</i> dan derivatif pada tanggal laporan yang dimiliki entitas, disajikan dalam mata uang asing
80	110521	Aset Lain-lain - <i>in Local Currency</i> - Bagian Lancar	Aset Lainnya tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap, masa manfaat 12 bulan dan dicatat dalam mata uang rupiah
81	110522	Aset Lain-lain - <i>in Foreign Currency</i> - Bagian Lancar	Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap, dengan

			masa manfaat 12 bulan dan dicatat dalam mata uang asing
82	120101	Obligasi - <i>in Local Currency</i>	Investasi berupa Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang diterbitkan oleh korporasi/ perseorangan, disaji dalam mata uang rupiah
83	120102	Obligasi - <i>in Foreign Currency</i>	Investasi berupa Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang diterbitkan oleh korporasi/ perseorangan, disaji dalam mata uang asing
84	120103	Obligasi/Sukuk Pemerintah - <i>in Local Currency</i>	Investasi berupa Obligasi/Sukuk Pemerintah yang merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN)/ Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel), yang disajikan dalam mata uang rupiah
85	120104	Obligasi/Sukuk Pemerintah - <i>in Foreign Currency</i>	Investasi berupa Obligasi/Sukuk Pemerintah yang merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI, dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN)/ Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel), disajikan dalam mata uang asing
86	120105	Sukuk - <i>in Local Currency</i>	Investasi Sukuk merupakan instrumen investasi utang sama seperti Obligasi namun menggunakan sistem syariah, yang disajikan dalam mata uang rupiah
87	120106	Sukuk - <i>in Foreign Currency</i>	Investasi Sukuk merupakan instrumen investasi utang yang sama seperti Obligasi namun menggunakan sistem syariah, yang disajikan dalam mata uang asing
88	120107	<i>Medium Term Notes - in Local Currency</i>	Investasi berupa <i>Medium Term Notes</i> merupakan jenis instrumen surat berharga berbasis utang diterbitkan oleh perusahaan membutuhkan pembiayaan selama jangka waktu tertentu, disajikan dalam

			mata uang rupiah
89	120108	<i>Medium Term Notes - in Foreign Currency</i>	Investasi berupa <i>Medium Term Notes</i> merupakan jenis instrumen surat berharga berbasis utang diterbitkan oleh perusahaan membutuhkan pembiayaan selama jangka waktu tertentu, disajikan dalam mata uang asing
90	120109	Reksadana - <i>in Local Currency</i>	Investasi berupa Reksadana (wadah untuk menghimpun dana masyarakat dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan kedalam surat-surat berharga), yang disajikan dalam mata uang rupiah
91	120110	Reksadana - <i>in Foreign Currency</i>	Investasi berupa Reksadana (wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh Manajer Investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat-surat berharga), yang disajikan dalam mata uang asing
92	120111	Wesel Tagih - <i>in Local Currency</i>	Investasi surat berharga dalam bentuk wesel tagih (pernyataan utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal), wesel ekspor, SKBDN, yang disajikan dalam mata uang rupiah
93	120112	Wesel Tagih - <i>in Foreign Currency</i>	Investasi surat berharga dalam bentuk wesel tagih (pernyataan utang pelanggan dalam bentuk tertulis yang formal), wesel ekspor, SKBDN, yang disajikan dalam mata uang asing
94	120113	<i>Structured Deposits</i> dan Deposito Berjangka - <i>in Local Currency</i>	Simpanan yang diserap oleh bank komersial melekat pada derivatif keuangan/kredit dari suatu entitas (dalam beberapa kasus merupakan kombinasi deposito dengan produk investasi), dapat diperoleh imbal balik relevan dengan risiko tertentu, disajikan dalam mata uang rupiah.
95	120114	<i>Structured Deposits</i> dan Deposito Berjangka - <i>in Foreign Currency</i>	Simpanan diserap oleh bank komersial melekat derivatif keuangan/kredit dari suatu entitas (dalam beberapa kasus merupakan kombinasi antara deposito dengan produk

			investasi), sehingga diperoleh imbal balik relevan dengan risiko tertentu, disajikan dalam mata uang asing.
96	120115	Saham - <i>in Local Currency</i>	Investasi berupa Saham yang merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan, dalam mata uang rupiah
97	120116	Saham - <i>in Foreign Currency</i>	Investasi berupa Saham yang merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan, dalam mata uang asing
98	120117	Saham Preferen - <i>in Local Currency</i>	Investasi Saham Preferen, yaitu saham yang memberikan prioritas lebih kepada pemilikinya atas aset dan laba perusahaan, disajikan dalam mata uang rupiah
99	120118	Saham Preferen - <i>in Foreign Currency</i>	Investasi Saham Preferen, yaitu saham yang memberikan prioritas lebih kepada pemilikinya atas aset dan laba perusahaan, disajikan dalam mata uang asing
100	120119	Modal Ventura - <i>in Local Currency</i>	Investasi Modal Ventura, pembiayaan/penyertaan modal kedalam Perusahaan (<i>investee</i>) untuk jangka waktu tertentu, yang disajikan dalam mata uang rupiah
101	120120	Modal Ventura - <i>in Foreign Currency</i>	Investasi berupa Modal Ventura, usaha pembiayaan/penyertaan modal kedalam suatu Perusahaan (<i>investee</i>) untuk jangka waktu tertentu, yang disajikan dalam mata uang rupiah
102	120121	Efek-efek Lainnya - <i>in Local Currency</i>	Investasi berupa Instrumen Efek Lainnya yang tidak masuk dalam klasifikasi Saham, Obligasi, atau Reksadana yang disajikan dalam mata uang rupiah
103	120122	Efek-efek Lainnya - <i>in Foreign Currency</i>	Investasi Instrumen Efek Lainnya tidak masuk dalam klasifikasi Saham, Obligasi, atau Reksadana yang disajikan dalam mata uang asing
104	120201	Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali - <i>in Local Currency</i>	Investasi berupa Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, dalam mata uang rupiah

105	120219	Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali - <i>in Foreign Currency</i>	Investasi berupa Efek dibeli dengan janji dijual kembali, dalam mata uang asing
106	120202	Tagihan Lainnya - Transaksi Perdagangan - <i>in Local Currency</i>	Termasuk di dalamnya <i>Usance L/C</i> , Tagihan <i>Supplier Chain Financing</i> , dan lainnya dan digunakan untuk mencatat fasilitas pembiayaan <i>non-cash loan</i> nasabah (importir) untuk pembayaran L/C berjangka, tetapi eksportir tetap mendapatkan pembayarannya langsung (<i>at sight</i>), disajikan dalam mata uang rupiah
107	120203	Tagihan Lainnya - Transaksi Perdagangan - <i>In Foreign Currency</i>	Termasuk di dalamnya <i>Usance L/C</i> , Tagihan <i>Supplier Chain Financing</i> , dan lainnya dan digunakan untuk mencatat fasilitas pembiayaan <i>non-cash loan</i> kepada nasabah (importir) untuk pembayaran L/C secara berjangka, eksportir tetap mendapatkan pembayarannya secara langsung (<i>at sight</i>), yang disajikan dalam mata uang asing.
108	120204	Tagihan Akseptasi - <i>in Local Currency</i>	Tagihan yang terutang oleh importir/pembeli barang sebagai akibat dari akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka, yaitu pernyataan kesanggupan bank pengaksep untuk membayar surat wesel pada hari bayar, yang dicatat dalam mata uang rupiah
109	120205	Tagihan Akseptasi - <i>in Foreign Currency</i>	Tagihan terutang oleh importir/pembeli barang sebagai akibat dari akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka, yaitu pernyataan kesanggupan bank pengaksep untuk membayar surat wesel pada hari bayar, yang dicatat dalam mata uang asing
110	120206	Kredit/Pinjaman Perbankan - <i>in Local Currency</i>	Tagihan terutang oleh nasabah atas kredit diberikan pihak bank konvensional, disajikan dalam mata uang rupiah
111	120207	Kredit/Pinjaman Perbankan - <i>in Foreign Currency</i>	Tagihan terutang oleh nasabah atas kredit diberikan pihak bank konvensional, disajikan dalam mata uang asing

112	120208	Provisi atas Kredit Perbankan	Biaya administrasi dikenakan kepada nasabah atas pinjaman kredit perbankan
113	120209	Kredit/Pinjaman Perbankan Syariah - <i>in Local Currency</i>	Tagihan terutang oleh nasabah atas kredit yang diberikan pihak bank syariah, disajikan dalam mata uang rupiah.
114	120210	Kredit/Pinjaman Perbankan Syariah - <i>in Foreign Currency</i>	Tagihan yang terutang oleh nasabah atas kredit diberikan pihak bank syariah, disajikan dalam mata uang asing.
115	120211	Provisi atas Kredit Perbankan Syariah	Biaya administrasi dikenakan kepada nasabah atas pinjaman kredit perbankan syariah
116	120212	Kredit Sindikasi	Pemberian kredit hasil kerjasama antara beberapa bank kepada satu debitur/ nasabah
117	120213	Penerusan Kredit	Pemberian Kredit dengan perjanjian kredit kepada nasabah dananya disalurkan melalui lembaga kredit lain/ lembaga pembiayaan sesuai ketentuan BI
118	120214	Kredit yang Dijamin	Pemberian kredit kepada nasabah dengan jaminan berupa deposito dan/atau setoran jaminan lainnya
119	120215	Kartu Kredit	Kartu yang diterbitkan oleh bank/pengelola kartu kredit lainnya, yang memberikan hak kepada pemilik kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran kredit atas transaksi peroleh barang/jasa
120	120216	Efek Beragun Aset	Efek yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan-tagihan seperti tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, dan lain-lain
121	120217	Piutang Murabahah, Salam, dan Istishna	Piutang atas murabahah, salam, dan istishna yang merupakan akad jual beli
122	120218	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit dan Pembiayaan	Jumlah yang wajib dibentuk untuk menampung penurunan nilai tercatat atas kredit dan pembiayaan, hingga menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset keuangan
123	120301	Akumulasi Iuran Pensiun	Dana program pensiun yang dikelola PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI (Persero)

124	130101	Piutang Premi dan Iuran- Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Piutang atas tagihan premi dan iuran, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang rupiah
125	130102	Piutang Premi dan Iuran- Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang atas tagihan premi dan iuran, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang asing
126	130103	Piutang Asuransi, Reasuransi, dan Retrosesi - Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Piutang atas asuransi, reasuransi, dan retrosesi yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat mata uang rupiah
127	130104	Piutang Asuransi, Reasuransi, dan Retrosesi - Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang atas asuransi, reasuransi, dan retrosesi yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang asing
128	130105	Aset Reasuransi - Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Aset Reasuransi berupa hak kontraktual neto dalam kontrak reasuransi, jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat mata uang rupiah
129	130106	Aset Reasuransi - Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Aset Reasuransi berupa hak kontraktual neto dalam kontrak reasuransi, jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang asing
130	130107	Piutang Hasil Investasi - Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Dana Pensiun sudah jatuh tempo namun belum diterima pembayarannya dalam waktu lebih dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan, dicatat dalam mata uang rupiah
131	130108	Piutang Hasil Investasi - Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Dana Pensiun sudah jatuh tempo namun belum diterima pembayarannya dalam waktu lebih dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan, dicatat dalam mata uang asing
132	130109	Piutang Pembiayaan dan Sewa Pembiayaan - Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Piutang Pembiayaan dan Sewa Pembiayaan (sewa yang menyebabkan perpindahan kepemilikan aset), jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang rupiah
133	130110	Piutang Pembiayaan dan Sewa Pembiayaan - Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang Pembiayaan dan Sewa Pembiayaan (sewa yang menyebabkan perpindahan kepemilikan aset), jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang asing

134	130111	Tagihan Anjak Piutang - Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Tagihan atas Anjak Piutang telah dilakukan, jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang rupiah
135	130112	Tagihan Anjak Piutang - Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Tagihan atas Anjak Piutang yang telah dilakukan, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang asing
136	130113	Piutang Sewa Operasi - Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Piutang atas Sewa Operasi, sewa yang tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan atas aset, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang rupiah
137	130114	Piutang Sewa Operasi - Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang atas Sewa Operasi, sewa yang tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan atas aset, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang asing
138	130115	Piutang Retensi - Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Piutang merupakan jaminan kepada <i>customer</i> dapat ditagih jika proyek telah terselesaikan, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang rupiah
139	130116	Piutang Retensi - Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang yang merupakan jaminan kepada <i>customer</i> yang dapat ditagih jika proyek telah terselesaikan, jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang asing
140	130117	Tagihan Bruto kepada Pelanggan - Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Tagihan atas pekerjaan masih dalam pelaksanaan kepada pelanggan, jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat mata uang rupiah. Istimewa lain dapat disebut Tagihan kepada Pemberi Kerja.
141	130118	Tagihan Bruto kepada Pelanggan - Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Tagihan atas pekerjaan masih dalam pelaksanaan kepada pelanggan, jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang asing. Istimewa lain dapat disebut sebagai Tagihan kepada Pemberi Kerja.
142	130119	Piutang <i>Past Service Liabilities</i> (PSL) Pemberi Kerja - Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Kewajiban Perusahaan dalam Program Pesangon untuk memperhitungkan masa kerja telah terbentuk (masa kerja lampau) karyawan pada saat Program Pesangon diadakan oleh Perusahaan, jatuh tempo waktu 12 bulan dan dicatat

			dalam mata uang rupiah
143	130120	Piutang <i>Past Service Liabilities</i> (PSL) Pemberi Kerja - Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Kewajiban Perusahaan dalam Program Pesangon untuk memperhitungkan masa kerja telah terbentuk (masa kerja lampau) karyawan pada saat Program Pesangon diadakan oleh Perusahaan, jatuh tempo waktu 12 bulan dan dicatat dalam mata uang asing
144	130121	Piutang Usaha/Jasa/Penjualan - Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Sejumlah uang terutang oleh pelanggan atas pembelian barang/jasa secara kredit, jatuh tempo pelunasannya lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang rupiah
145	130122	Piutang Usaha/Jasa/Penjualan - Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Sejumlah uang terutang oleh pelanggan atas pembelian barang/jasa secara kredit, jatuh tempo pelunasannya lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang asing
146	130123	Piutang Ventura Bersama dan Kerjasama Operasi - Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Piutang timbul dari ventura bersama dan kerjasama operasi (<i>joint venture dan joint operation</i>), yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang rupiah
147	130124	Piutang Ventura Bersama dan Kerjasama Operasi - Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang timbul dari ventura bersama dan kerjasama operasi (<i>joint venture dan joint operation</i>), jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang asing
148	130125	Piutang kepada Pemerintah - Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Sejumlah uang terutang/ masih harus diterima dari pemerintah sebagai akibat dari perjanjian/hal lainnya yang sah, jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat mata uang rupiah
149	130126	Piutang kepada Pemerintah - Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Sejumlah uang terutang/ masih harus diterima dari pemerintah sebagai akibat dari perjanjian atau hal lainnya yang sah, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang asing
150	130127	Piutang Lainnya - Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Piutang non-usaha berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang rupiah. Termasuk Tagihan Pengembalian Pajak.

151	130128	Piutang Lainnya - Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Piutang non-usaha berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang asing
152	130129	Cadangan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Panjang - <i>in Local Currency</i>	Cadangan atas piutang tak tertagih, yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari akun piutang dan diperlakukan sebagai akun kontra piutang di neraca, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang rupiah
153	130130	Cadangan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Jangka Panjang - <i>in Foreign Currency</i>	Cadangan atas piutang tak tertagih, yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari akun piutang dan diperlakukan sebagai akun kontra piutang di neraca, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang asing
154	130201	Investasi pada Entitas Asosiasi	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, yaitu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh yang signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun <i>joint venture</i> dari investornya
155	130202	Investasi pada Ventura Bersama dan Operasi Bersama	Investasi yang ditempatkan pada <i>joint venture</i> dan <i>joint operation</i>
156	130203	Investasi Langsung/Jangka Panjang Lainnya	Investasi dimana investor terlibat secara langsung dalam pembelian hingga penjualan, serta mencatat Investasi jangka panjang lainnya
157	130301	Properti Investasi - Tanah	Properti berupa Tanah yang dimiliki untuk menghasilkan rental/sewa atau kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak digunakan dalam produksi atau penyediaan barang/jasa
158	130302	Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	Properti Gedung Bangunan ydimiliki untuk menghasilkan rental/sewa/kenaikan/keduany a, dan tidak digunakan dalam produksi/penyediaan barang/jasa
159	130303	Properti Investasi - Aset dalam Penyelesaian	Properti berupa Aset dalam Penyelesaian dimiliki untuk menghasilkan rental/sewa atau kenaikan nilai/keduanya, dan tidak digunakan dalam produksi

			atau penyediaan barang/jasa
160	130304	Properti Investasi - Lainnya	Properti Lainnya selain Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Aset dalam Penyelesaian dimiliki untuk menghasilkan rental/sewa/ kenaikan nilai/keduanya dan tidak digunakan dalam produksi atau penyediaan barang/jasa
161	130305	Akumulasi Perubahan Nilai Wajar Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	Total penyusutan nilai Properti Investasi berupa Gedung dan Bangunan sebagai akibat dari penggunaan sehari-hari
162	130306	Akumulasi Perubahan Nilai Wajar Properti Investasi - Aset dalam Penyelesaian	Total penyusutan nilai Properti Investasi berupa Aset dalam Penyelesaian sebagai akibat dari penggunaan sehari-hari
163	130307	Akumulasi Perubahan Nilai Wajar Properti Investasi - Lainnya	Total penyusutan nilai Properti Investasi Lainnya selain Gedung, Bangunan, dan Aset Penyelesaian sebagai akibat dari penggunaan sehari-hari
164	130401	Aset Tetap - Tanah dan Hak atas Tanah	Aset Tetap berupa Tanah dan Hak atas Tanah diperoleh digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan masa manfaat lebih dari 1 tahun
165	130402	Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan yang diperoleh untuk digunakan kegiatan operasional perusahaan masa manfaat lebih dari 1 tahun
166	130403	Aset Tetap - Jalan dan Jembatan	Aset Tetap berupa Jalan dan Jembatan diperoleh digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan masa manfaat lebih dari 1 tahun
167	130404	Aset Tetap - Peralatan, Mesin dan Komputer	Aset Tetap berupa Peralatan, Mesin, dan Komputer yang diperoleh digunakan kegiatan operasional perusahaan masa manfaat lebih dari 1 tahun
168	130405	Aset Tetap - Instalasi dan Mesin Pembangkit	Aset Tetap berupa Instalasi dan Mesin Pembangkit yang diperoleh digunakan kegiatan operasional perusahaan masa manfaat lebih dari 1 tahun
169	130406	Aset Tetap - Kendaraan dan Sarana Gerak	Aset Tetap berupa Kendaraan dan Sarana Gerak yang diperoleh digunakan kegiatan operasional perusahaan masa manfaat lebih dari 1 tahun

170	130407	Aset Tetap - Rangka Pesawat	Aset Tetap Rangka Pesawat diperoleh untuk kegiatan operasional perusahaan masa manfaat lebih dari 1 tahun
171	130408	Aset Tetap - Aset dalam Penyelesaian	Aset Tetap berupa Aset dalam Penyelesaian diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan masa manfaat lebih dari 1 tahun
172	130409	Aset Tetap - Lainnya	Aset Tetap Lainnya tidak dapat dikelompokkan sebagai Tanah, Gedung dan Bangunan, Jakan dan Jembatan, Peralatan, Mesin, Kendaraan, dan Aset dalam Penyelesaian, diperoleh digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan masa manfaat lebih dari 1 tahun
173	130410	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Hak atas Tanah	Total penyusutan nilai Hak atas Tanah sebagai akibat dari penggunaan aset sehari-hari
174	130411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	Total penyusutan nilai Gedung dan Bangunan akibat dari penggunaan aset sehari-hari
175	130412	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Jalan dan Jembatan	Total penyusutan nilai Jalan dan Jembatan akibat dari penggunaan aset sehari-hari
176	130413	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Peralatan, Mesin, dan Komputer	Total penyusutan nilai Peralatan, Mesin, dan Komputer sebagai akibat dari penggunaan aset sehari-hari
177	130414	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Instalasi dan Mesin Pembangkit	Total penyusutan nilai Instalasi Mesin Pembangkit akibat dari penggunaan aset sehari-hari
178	130415	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Kendaraan dan Sarana Gerak	Total penyusutan nilai Kendaraan dan Sarana Gerak akibat penggunaan aset sehari-hari
179	130416	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Rangka Pesawat	Total penyusutan nilai Rangka Pesawat sebagai akibat dari penggunaan aset sehari-hari
180	130417	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Aset dalam Penyelesaian	Total penyusutan nilai Aset dalam Penyelesaian sebagai akibat dari penggunaan aset sehari-hari
181	130418	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Lainnya	Total penyusutan nilai Aset Tetap Lainnya sebagai akibat dari penggunaan aset sehari-hari
182	130419	Akumulasi Penurunan Nilai Aset Tetap	Total penurunan nilai pada Aset Tetap, jika pada akhir periode pelaporan entitas menilai terdapat indikasi penurunan

			nilai atas aset tetap
183	130420	Aset Hak Guna - Tanah	Hak Guna atas Tanah dari sewa operasi (<i>operating lease</i>), yaitu sewa tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan aset
184	130421	Aset Hak Guna - Gedung dan Bangunan	Hak Guna atas Gedung Bangunan dari sewa operasi (<i>operating lease</i>) dilakukan, yaitu sewa tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu aset
185	130422	Aset Hak Guna - Jalan dan Jembatan	Hak Guna atas Jalan dan Jembatan dari sewa operasi (<i>operating lease</i>) dilakukan, yaitu sewa tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu aset
186	130423	Aset Hak Guna - Peralatan, Mesin, dan Komputer	Hak Guna atas Peralatan, Mesin, dan Komputer dari sewa operasi (<i>operating lease</i>) yang dilakukan, yaitu sewa tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu aset
187	130424	Aset Hak Guna - Instalasi dan Mesin Pembangkit	Hak Guna atas Instalasi dan Mesin Pembangkit sewa operasi (<i>operating lease</i>) dilakukan, yaitu sewa tidak menyebabkan adanya perpindahan kepemilikan suatu aset
188	130425	Aset Hak Guna - Kendaraan dan Sarana Gerak	Hak Guna atas Kendaraan dan Sarana Gerak dari sewa operasi (<i>operating lease</i>) dilakukan, yaitu sewa tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu aset
189	130426	Aset Hak Guna - Lainnya	Hak Guna Aset Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan, Mesin, dan Kendaraan
190	130427	Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna - Tanah	Total penyusutan nilai Hak Guna atas Tanah sebagai akibat dari penggunaan sehari-hari
191	130428	Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna - Gedung dan Bangunan	Total penyusutan nilai Hak Guna atas Gedung dan Bangunan sebagai akibat dari penggunaan sehari-hari
192	130429	Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna - Jalan dan Jembatan	Total penyusutan nilai Hak Guna atas Jalan dan Jembatan akibat dari penggunaan sehari-hari
193	130430	Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna -	Total penyusutan nilai Hak Guna atas Peralatan, Mesin, dan

		Peralatan, Mesin dan Komputer	Komputer sebagai akibat dari penggunaan sehari-hari
194	130431	Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna - Instalasi dan Mesin Pembangkit	Total penyusutan nilai Hak Guna atas Instalasi dan Mesin Pembangkit sebagai akibat dari penggunaan sehari-hari
195	130432	Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna - Kendaraan dan Sarana Gerak	Total penyusutan nilai Hak Guna atas Kendaraan dan Sarana Gerak sebagai akibat dari penggunaan sehari-hari
196	130433	Akumulasi Penyusutan Aset Hak Guna - Lainnya	Total penyusutan nilai Hak Guna Aset Lainnya sebagai akibat dari penggunaan sehari-hari
197	130434	Akumulasi Penurunan Nilai Aset Hak Guna	Total penurunan nilai Aset Hak Guna, jika akhir periode pelaporan entitas menilai bahwa terdapat indikasi penurunan nilai atas aset hak guna
198	130435	Aset Real Estat - Tanah Belum Dikembangkan	Aset Real Estat berupa Tanah yang Belum Dikembangkan, yang dapat digunakan untuk tujuan komersial atau industri
199	130436	Aset sewa pembiayaan - Tanah	Tanah dari sewa pembiayaan (<i>finance lease</i>) dilakukan, sewa menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu aset
200	130437	Aset sewa pembiayaan - Bangunan	Bangunan dari sewa pembiayaan (i) dilakukan, sewa menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu aset
201	130438	Aset sewa pembiayaan - Peralatan dan Mesin	Peralatan Mesin dari sewa pembiayaan (<i>finance lease</i>) dilakukan, sewa menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu aset
202	130439	Aset sewa pembiayaan - Kendaraan	Kendaraan dari sewa pembiayaan (<i>finance lease</i>) yang dilakukan, yaitu sewa menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu aset
203	130440	Akumulasi Penyusutan Aset sewa pembiayaan - Tanah	Total penyusutan nilai aset sewa pembiayaan berupa Tanah sebagai akibat dari penggunaan sehari-hari
204	130441	Akumulasi Penyusutan Aset sewa pembiayaan - Bangunan	Total penyusutan nilai Aset sewa pembiayaan berupa Bangunan sebagai akibat dari penggunaan sehari-hari
205	130442	Akumulasi Penyusutan Aset sewa pembiayaan - Peralatan dan Mesin	Total penyusutan nilai Aset sewa pembiayaan berupa Peralatan dan Mesin sebagai akibat penggunaan sehari-hari

206	130443	Akumulasi Penyusutan Aset sewa pembiayaan - Kendaraan	Total penyusutan nilai Aset sewa pembiayaan berupa Kendaraan sebagai akibat dari penggunaan sehari-hari
207	130444	Aset Minyak, Gas, and Panas Bumi	Aset pertambangan yang dimiliki entitas berupa aset minyak, gas, dan panas bumi
208	130445	Akumulasi Penurunan Nilai Aset Minyak dan Gas	Total penurunan nilai pada Minyak, Gas, dan Panas Bumi, jika pada akhir periode pelaporan entitas menilai terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tersebut
209	130446	Properti Pertambangan	Aset pertambangan dimiliki entitas berupa aset properti pertambangan merupakan hasil gabungan aset eksplorasi dan evaluasi telah masuk keputusan pengembangan, dengan biaya pengembangan selanjutnya
210	130447	Aset Eksplorasi dan Evaluasi - Minyak, Gas, dan Panas Bumi	Biaya eksplorasi evaluasi minyak, gas, dan panas bumi diakui sebagai aset kebijakan akuntansi suatu entitas
211	130448	Aset Eksplorasi dan Evaluasi - Pertambangan	Biaya eksplorasi dan evaluasi dalam aktivitas pertambangan yang diakui sebagai aset kebijakan akuntansi suatu entitas
212	130501	<i>Software</i>	Aset Tak Berwujud berupa <i>Software</i> atau perangkat lunak komputer
213	130502	<i>License</i>	Aset Tak Berwujud <i>License</i> merupakan penyerahan hak kepada pihak lain untuk melakukan produksi atas produk/jasa tertentu yang telah dipatenkan sebelumnya
214	130503	Hak Konsesi	Aset Tak Berwujud berupa Hak Konsesi, merupakan bentuk perjanjian dilakukan dengan pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur dan layanan umum kepada publik
215	130504	<i>Goodwill</i>	Aset Tak Berwujud berupa <i>Goodwill</i> , aset tidak berwujud berupa selisih angka muncul dari kelebihan harga beli yang jauh dari harga wajar pasar dalam transaksi pembelian suatu perusahaan

216	130505	Aset Tak Berwujud Lainnya	Aset Tak Berwujud Lainnya selain <i>Software, License, Hak Konsensi, dan Goodwill</i>
217	130506	Amortisasi ATB	Alokasi sistematis atas harga perolehan Aset Tak Berwujud untuk dibebankan selama masa manfaatnya
218	130601	Pajak Dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar	Pajak telah dipotong/ dipungut oleh pihak atau dibayarkan sendiri oleh wajib pajak, dapat diperhitungkan dengan pajak terutang nantinya, waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun
219	130602	Biaya Dibayar di Muka - <i>in Local Currency</i> - Bagian Tidak Lancar	Semua biaya yang telah dibayarkan akan tetapi belum menjadi biaya pada periode tersebut lebih dari 12 bulan yang disajikan dalam mata uang rupiah
220	130603	Biaya Dibayar di Muka - <i>in Foreign Currency</i> - Bagian Tidak Lancar	Semua biaya yang telah dibayarkan akan tetapi belum menjadi biaya pada periode tersebut lebih dari 12 bulan, yang disajikan dalam mata uang asing
221	130604	Uang Muka - Bagian Tidak Lancar	Sejumlah uang dibayarkan diawal transaksi tertentu yang biasanya pada pembelian kredit barang, yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun
222	130701	Aset Biologik - Tidak Lancar	Aset entitas hewan hidup dan/ atau tanaman <i>non cultivated</i> (tidak dibudidayakan)
223	130703	Aset Pajak Tangguhan	Aset pajak tangguhan meliputi akun-akun transaksi yang memiliki perbedaan temporer dengan pajak yang mana secara perpajakan belum dibebankan/sudah diakui sebagai pendapatan dimana jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya: 1) perbedaan temporer dapat dikurangkan; 2) akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, hal peraturan perpajakan mengizinkan
224	130704	Kas yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Local</i>	Uang tunai yang dimiliki entitas dalam rupiah dibatasi

		<i>Currency</i> - Jangka Panjang	penggunaannya dan tidak dapat digunakan secara bebas lebih dari 12 bulan.
225	130705	Kas yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Uang tunai yang dimiliki entitas dalam mata uang asing dan dibatasi penggunaannya dan tidak dapat digunakan secara bebas lebih dari 12 bulan.
226	130706	Giro yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Dana dalam bentuk giro yang ditempatkan entitas di Bank dalam mata uang rupiah dan dibatasi penggunaannya lebih dari 12 bulan.
227	130707	Giro yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Dana dalam bentuk giro yang ditempatkan entitas di Bank dalam mata uang asing dan dibatasi penggunaannya lebih dari 12 bulan.
228	130708	Tabungan yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Dana dalam bentuk tabungan yang ditempatkan entitas di Bank dalam mata uang rupiah dan dibatasi penggunaannya lebih dari 12 bulan.
229	130709	Tabungan yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Dana dalam bentuk tabungan yang ditempatkan entitas di Bank dalam mata uang asing dan dibatasi penggunaannya lebih dari 12 bulan.
230	130710	Deposito yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Dana dalam bentuk deposito yang ditempatkan entitas di Bank dalam mata uang rupiah dan dibatasi penggunaannya lebih dari 12 bulan.
231	130711	Deposito yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Dana dalam bentuk deposito yang ditempatkan entitas di Bank dalam mata uang asing dan dibatasi penggunaannya lebih dari 12 bulan.
232	130712	Inter-bank Call Money yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Pinjaman antar bank dalam proses kliring yang dilakukan entitas dalam rupiah dan dibatasi penggunaannya lebih dari 12 bulan.
233	130713	Inter-bank Call Money yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Pinjaman antar bank dalam proses kliring yang dilakukan entitas dalam mata uang asing dan dibatasi penggunaannya lebih dari 12 bulan.
234	130714	Penempatan pada Bank Lainnya yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Dana dalam bentuk selain giro, tabungan, dan deposito berjangka yang ditempatkan entitas di Bank dalam rupiah dan dibatasi penggunaannya

			lebih dari 12 bulan.
235	130715	Penempatan pada Bank Lainnya yang Dibatasi Penggunaannya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Dana dalam bentuk selain giro, tabungan, dan deposito berjangka yang ditempatkan entitas di Bank dalam mata uang asing dan dibatasi penggunaannya lebih dari 12 bulan.
236	130716	Pendapatan yang Masih Akan Diterima - <i>in Local Currency</i> - Bagian Tidak Lancar	Pendapatan yang masih harus diterima dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan, dicatat dalam mata uang rupiah
237	130717	Pendapatan yang Masih Akan Diterima - <i>in Foreign Currency</i> - Bagian Tidak Lancar	Pendapatan yang masih harus diterima dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan, dicatat dalam mata uang asing
238	130718	Setoran Jaminan - Bagian Tidak Lancar	Sejumlah uang dibayarkan ke bank sebagai jaminan nantinya akan diperhitungkan saat penyelesaian suatu transaksi, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun
239	130719	Pinjaman Polis - Bagian Tidak Lancar	Dana dipinjamkan kepada peserta pensiun dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun
240	130720	Perlengkapan - Bagian Tidak Lancar	Perlengkapan/Bahan Habis Pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun
241	130721	Tanah dalam Pengembangan - Bagian Tidak Lancar	Aset berupa tanah yang masih dalam pengembangan, dengan masa manfaat atau waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun
242	130722	Aset Lain-lain – Bagian Tidak Lancar	Aset Lainnya tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap, masa manfaat lebih dari 1 tahun
243	210101	Utang Usaha - <i>in Local Currency</i>	Kewajiban/Utang yang muncul ketika terjadi transaksi terkait usaha (<i>Core business</i>) secara kredit, yang disajikan dalam mata uang rupiah
244	210102	Utang Usaha - <i>in Foreign Currency</i>	Kewajiban/Utang yang muncul ketika terjadi transaksi terkait usaha (<i>Core business</i>) secara kredit, yang disajikan dalam mata uang asing
245	210103	Liabilitas Segera - <i>in Local Currency</i>	Kewajiban Bank kepada pihak lain sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat/ perjanjian

			yang ditetapkan sebelumnya, dicatat mata uang rupiah
246	210104	Liabilitas Segera - <i>in Foreign Currency</i>	Kewajiban Bank kepada pihak lain sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat/perjanjian ditetapkan sebelumnya, dicatat dalam mata uang asing
247	210105	Utang Klaim - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Utang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung/perusahaan asuransi, dengan waktu jatuh tempo 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
248	210115	Utang Klaim - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Utang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim diajukan oleh tertanggung/ perusahaan asuransi, waktu jatuh tempo 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
249	210106	Utang Reasuransi dan Retrosesi - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Kewajiban jangka pendek (jatuh tempo waktu 12 bulan) entitas yang timbul terjadinya transaksi reasuransi, dicatat dalam mata uang rupiah. Utang reasuransi terdiri atas utang reasuransi dan utang retrosesi. Utang retrosesi merupakan utang reasuransi yang dimiliki oleh entitas reasuransi.
250	210116	Utang Reasuransi dan Retrosesi - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Kewajiban jangka pendek (jatuh tempo waktu 12 bulan) entitas timbul atas terjadinya transaksi reasuransi, dicatat dalam mata uang asing. Utang reasuransi terdiri atas utang reasuransi dan utang retrosesi. Utang retrosesi merupakan utang reasuransi yang dimiliki oleh entitas reasuransi.
251	210107	Utang Komisi - Jangka Pendek	Utang timbul sehubungan dengan terjadinya penutupan asuransi, dengan waktu jatuh tempo 12 bulan
252	210108	Utang Koasuransi - Jangka Pendek	Utang pihak tertanggung dan perusahaan reasuransi timbul sehubungan dengan kegiatan asuransi, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
253	210109	Utang/Titipan Premi - Jangka Pendek	Kewajiban jangka pendek (jatuh tempo dalam waktu 12 bulan)

			berupa premi dibayar dimuka dan penerimaan premi yang masih dalam proses identifikasi
254	210110	Utang Bruto kepada Pemberi Kerja - Jangka Pendek	Utang kontrak konstruksi, sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui, dikurangi dengan jumlah kerugian yang diakui, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
255	210111	Utang Barang dan Jasa Lainnya - Jangka Pendek	Utang Barang/Jasa Lainnya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
256	210112	Liabilitas yang Masih Harus Dibayar - <i>in Local Currency</i>	Biaya yang belum diselesaikan oleh perusahaan dan masih harus dibayar, yang disajikan dalam mata uang rupiah
257	210113	Liabilitas yang Masih Harus Dibayar - <i>in Foreign Currency</i>	Biaya yang belum diselesaikan oleh perusahaan dan masih harus dibayar, yang disajikan dalam mata uang asing
258	210114	Utang Pajak	Tagihan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, yang biasanya disebut dengan tunggakan pajak
259	210201	Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan/Pihak Berelasi - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Sejumlah pinjaman dari bank atau lembaga keuangan non-bank seperti koperasi simpan pinjam, pegadaian, dan lain-lain yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dicatat dalam mata uang rupiah
260	210202	Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan/Pihak Berelasi - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Sejumlah pinjaman dari bank atau lembaga keuangan non-bank seperti koperasi simpan pinjam, pegadaian, dan lain-lain yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, dicatat dalam mata uang asing
261	210203	Pinjaman <i>Two Step Loan</i> - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Pinjaman yang diterima oleh Pemerintah RI dari Lembaga Keuangan Internasional, yang kemudian diteruskan kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat melalui Bank Indonesia dengan waktu jatuh tempo 12 bulan, disajikan mata uang rupiah
262	210213	Pinjaman <i>Two Step Loan</i> - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Pinjaman yang diterima oleh Pemerintah RI dari Lembaga Keuangan Internasional, yang kemudian diteruskan kepada Bank Umum dan Bank

			Perkreditan Rakyat melalui Bank Indonesia dengan waktu jatuh tempo 12 bulan, disajikan mata uang asing
263	210204	Utang atas Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Liabilitas atas transaksi penjualan instrumen efek yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dan dicatat dalam mata uang rupiah
264	210205	Utang atas Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Liabilitas atas transaksi penjualan instrumen efek yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dan dicatat dalam mata uang asing
265	210206	Liabilitas Akseptasi - <i>in Local Currency</i> - Bagian Jangka Pendek	Liabilitas jangka pendek dari transaksi <i>letter of credit</i> (L/C) diakses oleh bank pengakses (<i>Accepting bank</i>). Liabilitas akseptasi diklasifikasikan liabilitas keuangan lainnya. Liabilitas akseptasi liabilitas keuangan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dalam bentuk konversi mata uang rupiah
266	210207	Liabilitas Akseptasi - <i>in Foreign Currency</i> - Bagian Jangka Pendek	Liabilitas jangka pendek dari transaksi <i>letter of credit</i> (L/C) yang diakses oleh bank pengakses (<i>Accepting bank</i>). Liabilitas akseptasi diklasifikasikan liabilitas keuangan lainnya. liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dalam bentuk konversi mata uang asing
267	210208	Bagian Lancar Utang Subordinasi - <i>In Local Currency</i>	Utang diperoleh berdasarkan perjanjian subordinasi, dimana kedudukan hak pemberi pinjaman subordinasi lebih rendah dari pada kedudukan

			hak pemberi pinjaman lain yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan dan dicatat dalam mata uang rupiah
268	210209	Bagian Lancar Utang Subordinasi - <i>In Foreign Currency</i>	Utang diperoleh berdasarkan perjanjian subordinasi, dimana kedudukan hak pemberi pinjaman subordinasi lebih rendah dari pada kedudukan hak pemberi pinjaman lain yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan dan dicatat dalam mata uang asing
269	210210	Kewajiban Anjak Piutang	Kewajiban kontrak antara entitas anjak piutang (sebagai penyedia jasa) dengan klien, dimana klien wajib menjual atau menjaminkan piutang (dari hasil penjualan barang secara kredit) kepada factoring.
270	210211	Utang kepada Pemerintah - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada Pemerintah sebagai akibat dari perjanjian atau hal lainnya yang sah, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dan disajikan dalam mata uang rupiah
271	210212	Utang kepada Pemerintah - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada Pemerintah sebagai akibat dari perjanjian atau hal lainnya yang sah, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dan disajikan dalam mata uang asing
272	210301	Efek-efek yang Diterbitkan - Obligasi - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Obligasi/surat utang jangka pendek diterbitkan sebagai salah satu sumber pembiayaan perusahaan, akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang dan disajikan dalam mata uang rupiah
273	210302	Efek-efek yang Diterbitkan - Obligasi - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Obligasi/surat utang jangka pendek diterbitkan sebagai salah satu sumber pembiayaan perusahaan, yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang dan disajikan dalam mata uang asing

274	210303	Efek-efek yang Diterbitkan - <i>Medium Term Notes - in Local Currency</i> - Jangka Pendek	<i>Medium Term Notes</i> diterbitkan sebagai salah satu sumber pembiayaan perusahaan selama jangka waktu tertentu, yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang dan disajikan dalam mata uang rupiah
275	210304	Efek-efek yang Diterbitkan - <i>Medium Term Notes - in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	<i>Medium Term Notes</i> diterbitkan salah satu sumber pembiayaan perusahaan selama jangka waktu tertentu, yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan/kurang dan disajikan dalam mata uang asing
276	210305	Efek-efek yang Diterbitkan - NCD - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	<i>Negotiable Certificate of Deposit (NCD)</i> sebagai instrumen yang diterbitkan oleh perbankan untuk mencari alternatif pendanaan dari luar pihak ketiga, yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang dan dicatat dalam mata uang rupiah
277	210306	Efek-efek yang Diterbitkan - NCD - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	<i>Negotiable Certificate of Deposit (NCD)</i> sebagai instrumen diterbitkan perbankan untuk mencari alternatif pendanaan dari luar pihak ketiga, yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang dan dicatat dalam mata uang asing
278	210307	Efek-efek yang Diterbitkan - Sukuk - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Surat utang syariah/obligasi syariah diterbitkan sebagai salah satu sumber pembiayaan perusahaan, waktu jatuh tempo 12 bulan dan dicatat dalam mata uang rupiah
279	210308	Efek-efek yang Diterbitkan - Sukuk - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Surat utang/atau obligasi syariah yang diterbitkan salah satu sumber pembiayaan perusahaan dengan waktu jatuh tempo 12 bulan dan dicatat dalam mata uang asing
280	210309	Efek-efek yang Diterbitkan - Lainnya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Surat berharga lainnya diterbitkan salah satu sumber pembiayaan perusahaan, waktu jatuh tempo 12 bulan, disajikan mata uang rupiah
281	210310	Efek-efek yang Diterbitkan - Lainnya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Surat berharga lainnya diterbitkan salah satu sumber pembiayaan perusahaan, waktu jatuh tempo 12 bulan, disajikan

			mata uang asing
282	210311	Bagian Lancar Obligasi Konversi	Suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari BUMN penerbit obligasi dan umumnya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut yang akan jatuh tempo dan terkonversi waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.
283	210312	Biaya Penerbitan yang Belum Diamortisasi - Efek-efek yang Diterbitkan - Jangka Pendek	Biaya penerbitan efek yang belum diamortisasi, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
284	210401	Utang/Liabilitas Sewa Pembiayaan Jatuh Tempo Kurang dari Satu Tahun	Utang yang timbul dari sewa pembiayaan (<i>finance lease</i>) yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun
285	210501	Utang Retensi - Jangka Pendek	Utang sejumlah termin (<i>progress billing</i>) yang belum dibayarkan atau ditahan hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut, dengan waktu jatuh tempo 12 bulan
286	210502	Provisi - Jangka Pendek	Tanggungan atas biaya administrasi dikenakan atas pinjaman yang diberikan oleh bank, dengan jangka waktu 12 bulan
287	210503	Pendapatan Diterima Di Muka dan Uang Muka - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Pendapatan sudah diterima pembayarannya namun belum jadi hak perusahaan karena masih terdapat kewajiban memberikan barang/jasa di kemudian hari, yang jatuh tempo dalam 12 bulan dan dicatat mata uang rupiah
288	210504	Pendapatan Diterima Di Muka dan Uang Muka - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Pendapatan sudah diterima pembayarannya namun belum jadi hak perusahaan karena masih terdapat kewajiban memberikan barang/jasa di kemudian hari, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dan dicatat dalam mata uang asing
289	210505	Liabilitas Perolehan/Pembelian/ Pembebasan Aset - Jangka Pendek	Liabilitas yang timbul pada transaksi perolehan aset tetap, dengan jatuh tempo 12 bulan

290	210507	Utang Transaksi Nasabah - Jangka Pendek	Utang yang timbul atas transaksi dilakukan dengan nasabah, dengan waktu jatuh tempo dalam 12 bulan
291	210508	Setoran/Utang Jaminan Pelanggan - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Utang yang timbul karena adanya setoran jaminan dari pelanggan yang nantinya akan diperhitungkan kembali saat penyelesaian suatu transaksi, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dan dicatat dalam mata uang rupiah
292	210509	Setoran/Utang Jaminan Pelanggan - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Utang yang timbul karena adanya setoran jaminan dari pelanggan yang nantinya akan diperhitungkan kembali saat penyelesaian suatu transaksi, yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dan dicatat dalam mata uang asing
293	210510	Utang Bunga - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan, dengan waktu jatuh tempo 12 bulan dan disajikan dalam mata uang rupiah
294	210511	Utang Bunga - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan, dengan waktu jatuh tempo 12 bulan dan disajikan dalam mata uang asing
295	210512	Liabilitas Kerjasama Operasi - Jangka Pendek	Liabilitas yang timbul dari kerjasama operasi (joint operation), yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan
296	210513	Uang Titipan - Jangka Pendek	Uang Titipan yang akan diambil kembali oleh pemiliknya masa mendatang, dengan waktu jatuh tempo 12 bulan
297	210514	Liabilitas Imbalan/Pasca Kerja - Jangka Pendek	Liabilitas atas imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya, sebesar iuran yang terutang kepada entitas program dana pensiun, dengan waktu jatuh tempo 12 bulan

298	210515	Liabilitas Derivatif - <i>in Local Currency</i>	Potensi kerugian instrumen dan kontrak derivatif yang disajikan mata uang rupiah
299	210516	Liabilitas Derivatif - <i>in Foreign Currency</i>	Potensi kerugian instrumen dan kontrak derivatif yang disajikan mata uang asing
300	210517	Liabilitas Lainnya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Pendek	Liabilitas Lainnya yang wajib dibayarkan perusahaan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, disajikan dalam mata uang rupiah
301	210518	Liabilitas Lainnya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Pendek	Liabilitas Lainnya yang wajib dibayarkan perusahaan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, disajikan dalam mata uang asing
302	220101	Simpanan Nasabah dan Bank Lain - <i>in Local Currency</i>	Dana yang ditempatkan oleh masyarakat termasuk bank kepada Bank dan entitas anak bergerak di bidang perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, mata uang rupiah
303	220102	Simpanan Nasabah dan Bank Lain - <i>in Foreign Currency</i>	Dana yang ditempatkan oleh masyarakat termasuk bank kepada Bank dan entitas anak yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, dalam mata uang asing
304	220103	Dana Syirkah Temporer - Giro/Tabungan/Deposito Mudharabah - <i>in Local Currency</i>	Dana giro/tabungan/deposito mudharabah yang diterima oleh entitas untuk mengelola dan menginvestasikan dana baik sesuai kebijakan entitas anak/kebijakan pembatasan dari pemilik dana dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan akad syariah, yang disajikan dalam mata uang rupiah
305	220104	Dana Syirkah Temporer - Giro/Tabungan/Deposito Mudharabah - <i>in Foreign Currency</i>	Dana giro/tabungan/deposito mudharabah yang diterima oleh entitas untuk mengelola dan menginvestasikan dana baik sesuai kebijakan entitas anak/kebijakan pembatasan dari pemilik dana dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan akad syariah, yang disajikan dalam mata uang asing
306	220201	Estimasi Klaim Retensi/Asuransi/Bank	Jumlah menjadi tanggungan sehubungan dengan klaim

		Garansi - <i>in Local Currency</i>	retensi/asuransi/bank garansi yang masih dalam proses penyelesaian dan disajikan dalam mata uang rupiah
307	220206	Estimasi Klaim Retensi/Asuransi/Bank Garansi - <i>in Foreign Currency</i>	Jumlah menjadi tanggungan sehubungan dengan klaim retensi/asuransi/bank garansi yang masih dalam proses penyelesaian dan disajikan dalam mata uang asing
308	220202	Utang Manfaat Polis Masa Depan	Jumlah dana yang harus disediakan oleh penanggung untuk membayar manfaat dan klaim masa mendatang pada tertanggung sebagaimana dinyatakan dalam polis
309	220203	Premi yang Belum Diakui Pendapatan	Porsi dari pendapatan premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode
310	220204	Estimasi Klaim IBNR	Estimasi klaim asuransi yang terjadi tetapi tidak dilaporkan (<i>Incurred But Not Reported/IBNR</i>) adalah jumlah yang terhutang oleh pihak asuransi kepada semua penuntut yang sah yang memiliki kerugian yang ditanggung tetapi belum melaporkannya
311	220205	Liabilitas terkait Asuransi Lainnya	Liabilitas terkait asuransi lainnya yang tidak masuk dalam klasifikasi telah ada.
312	220301	Dana Cadangan/Akumulasi Iuran Pensiun	Kumpulan dana yang merupakan akumulasi iuran pensiun pegawai beserta hasil pengembangannya
313	230101	Utang Klaim - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Kewajiban entitas yang timbul atas terjadinya klaim asuransi dari nasabah/konsumen yang lebih dari setahun dari periode pelaporan dan dicatat dalam mata uang rupiah
314	230108	Utang Klaim - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Kewajiban entitas yang timbul atas terjadinya klaim asuransi dari nasabah/konsumen yang lebih dari setahun dari periode pelaporan dan dicatat dalam mata uang asing
315	230102	Utang Reasuransi dan Retrosesi - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Kewajiban jangka panjang (jatuh tempo lebih dari 1 tahun) entitas timbul atas transaksi reasuransi, dicatat dalam mata

			uang rupiah. Utang reasuransi terdiri atas utang reasuransi dan utang retroseksi. Utang retroseksi merupakan utang reasuransi yang dimiliki oleh entitas reasuransi.
316	230109	Utang Reasuransi dan Retroseksi - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Kewajiban jangka panjang (jatuh tempo lebih dari 1 tahun) entitas yang timbul atas transaksi reasuransi, dicatat dalam mata uang asing. Utang reasuransi terdiri atas utang reasuransi dan utang retroseksi. Utang retroseksi merupakan utang reasuransi yang dimiliki oleh entitas reasuransi.
317	230105	Utang/Titipan Premi - Jangka Panjang	Premi yang dibayar di muka dan penerimaan premi masih dalam proses identifikasi yang lebih dari setahun dari periode pelaporan
318	230106	Utang Bruto kepada Pemberi Kerja - Jangka Panjang	Utang dalam kontrak konstruksi, sebesar selisih antara biaya terjadi ditambah laba yang diakui, dikurangi dengan jumlah kerugian yang diakui, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun
319	230107	Utang Barang dan Jasa Lainnya - Jangka Panjang	Utang Barang/Jasa Lainnya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam Utang Usaha, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun
320	230201	Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Pinjaman dari bank/lembaga keuangan non-bank seperti koperasi simpan pinjam, pegadaian, dan lain-lain yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat mata uang rupiah
321	230202	Pinjaman Bank/Lembaga Keuangan - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Pinjaman dari bank/lembaga keuangan non-bank seperti koperasi simpan pinjam, pegadaian, dan lain-lain yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dicatat dalam mata uang asing
322	230203	Pinjaman <i>Two Step Loan</i> - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Pinjaman yang diterima oleh Pemerintah RI dari Lembaga Keuangan Internasional, yang kemudian diteruskan kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat melalui Bank Indonesia dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun, disajikan dalam mata uang

			rupiah
323	230212	Pinjaman <i>Two Step Loan - in Foreign Currency - Jangka Panjang</i>	Pinjaman yang diterima oleh Pemerintah RI dari Lembaga Keuangan Internasional, yang kemudian diteruskan kepada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat melalui Bank Indonesia dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun, disajikan dalam mata uang asing
324	230204	Utang atas Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali - <i>in Local Currency - Jangka Panjang</i>	Liabilitas yang timbul atas surat berharga yang dijual dengan janji akan dibeli kembali yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang rupiah
325	230205	Utang atas Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali - <i>in Foreign Currency - Jangka Panjang</i>	Liabilitas yang timbul atas surat berharga yang dijual dengan janji akan dibeli kembali yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang asing
326	230206	Liabilitas Akseptasi - <i>in Local Currency - Bagian Jangka Panjang</i>	Liabilitas jangka panjang dari transaksi <i>letter of credit (L/C)</i> yang diaksep bank pengaksep (<i>Accepting bank</i>). Liabilitas akseptasi diklasifikasikan liabilitas keuangan lainnya. Liabilitas akseptasi yang diklasifikasikan adalah sebagai liabilitas keuangan diukur biaya perolehan diamortisasi konversi mata uang rupiah
327	230207	Liabilitas Akseptasi - <i>in Foreign Currency - Bagian Jangka Panjang</i>	Liabilitas jangka panjang dari transaksi <i>letter of credit (L/C)</i> yang diaksep oleh bank pengaksep (<i>Accepting bank</i>). Atas Liabilitas akseptasi diklasifikasikan liabilitas akseptasi keuangan lainnya yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dalam bentuk konversi mata uang asing
328	230208	Utang Subordinasi - <i>in Local Currency</i>	Utang yang pembayarannya ditempatkan lebih rendah kedudukan prioritasnya, sesudah perusahaan melunasi kewajiban lainnya, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang rupiah
329	230209	Utang Subordinasi - <i>in Foreign Currency</i>	Utang yang pembayarannya ditempatkan lebih rendah dari

			kedudukan prioritasnya, sesudah perusahaan melunasi kewajiban lainnya, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang asing
330	230210	Utang kepada Pemerintah - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah sebagai akibat dari perjanjian atau hal lainnya yang sah, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang rupiah
331	230211	Utang kepada Pemerintah - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah sebagai akibat dari perjanjian atau hal lainnya yang sah, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang asing
332	230301	Efek-efek yang Diterbitkan - Obligasi - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Obligasi/surat utang jangka pendek diterbitkan sebagai salah satu sumber pembiayaan perusahaan, yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan disajikan dalam mata uang rupiah
333	230302	Efek-efek yang Diterbitkan - Obligasi - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Obligasi/surat utang jangka pendek diterbitkan sebagai salah satu sumber pembiayaan perusahaan, akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan disajikan mata uang asing
334	230303	Efek-efek yang Diterbitkan - <i>Medium Term Notes</i> - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	<i>Medium Term Notes</i> diterbitkan salah satu sumber pembiayaan perusahaan selama jangka waktu tertentu, jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan disajikan mata uang rupiah
335	230304	Efek-efek yang Diterbitkan - <i>Medium Term Notes</i> - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	<i>Medium Term Notes</i> diterbitkan salah satu sumber pembiayaan perusahaan selama jangka waktu tertentu, yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan disajikan dalam mata uang asing
336	230305	Efek-efek yang Diterbitkan - NCD - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	<i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD) sebagai instrumen yang diterbitkan oleh perbankan untuk mencari alternatif pendanaan dari luar pihak ketiga, yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang rupiah

337	230306	Efek-efek yang Diterbitkan - NCD - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	<i>Negotiable Certificate of Deposit</i> (NCD) sebagai instrumen yang diterbitkan oleh perbankan untuk mencari alternatif pendanaan dari luar pihak ketiga, yang akan jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang asing
338	230307	Efek-efek yang Diterbitkan - Sukuk - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Surat utang syariah atau obligasi syariah uditerbitkan sebagai salah satu sumber pembiayaan perusahaan dan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang rupiah
339	230308	Efek-efek yang Diterbitkan - Sukuk - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Surat utang syariah/obligasi syariah diterbitkan sebagai salah satu sumber pembiayaan perusahaan, waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang asing
340	230309	Efek-efek yang Diterbitkan - Lainnya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Surat berharga lainnya yang diterbitkan sebagai salah satu sumber pembiayaan perusahaan, dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun, disajikan dalam mata uang rupiah
341	230310	Efek-efek yang Diterbitkan - Lainnya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Surat berharga lainnya yang diterbitkan sebagai salah satu sumber pembiayaan perusahaan, dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun, disajikan dalam mata uang asing
342	230311	Biaya Penerbitan yang Belum Diamortisasi - Efek-efek yang Diterbitkan - Jangka Panjang	Biaya penerbitan efek yang belum diamortisasi, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun
343	230401	Utang/Liabilitas Sewa Pembiayaan Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun	Utang yang timbul dari sewa pembiayaan (<i>finance lease</i>) yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun
344	230501	Utang Retensi - Jangka Panjang	Utang sejumlah termin (<i>progress billing</i>) yang belum dibayarkan atau ditahan hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut, dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun
345	230502	Provisi - Jangka Panjang	Tanggungan atas biaya administrasi dikenakan atas pinjaman yang diberikan oleh bank, dengan jangka waktu lebih

			dari 1 tahun
346	230503	Pendapatan Diterima Di Muka dan Uang Muka - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Pendapatan sudah diterima pembayarannya namun belum menjadi hak perusahaan karena masih terdapat kewajiban untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang rupiah
347	230504	Pendapatan Diterima Di Muka dan Uang Muka - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Pendapatan sudah diterima pembayarannya tapi belum menjadi hak perusahaan karena terdapat kewajiban memberi barang/jasa di kemudian hari, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang asing
348	230505	Liabilitas Perolehan/Pembelian/ Pembebasan Aset - Jangka Panjang	Liabilitas yang timbul pada transaksi perolehan aset tetap, dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun
349	230507	Utang Transaksi Nasabah - Jangka Panjang	Utang yang timbul atas transaksi dilakukan dengan nasabah, dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun
350	230508	Setoran/Utang Jaminan Pelanggan - <i>In Local Currency</i> - Jangka Panjang	Utang yang timbul karena adanya setoran jaminan dari pelanggan yang nantinya akan diperhitungkan kembali saat penyelesaian suatu transaksi, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang rupiah
351	230509	Setoran/Utang Jaminan Pelanggan - <i>In Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Utang yang timbul karena adanya setoran jaminan dari pelanggan yang nantinya akan diperhitungkan kembali saat penyelesaian suatu transaksi, yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan dicatat dalam mata uang asing
352	230510	Utang Bunga - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan, dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan disajikan dalam mata uang rupiah
353	230511	Utang Bunga - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap

			akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan, dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan disajikan dalam mata uang asing
354	230512	Liabilitas Kerjasama Operasi - Jangka Panjang	Liabilitas yang timbul dari kerjasama operasi (<i>joint operation</i>), yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun
355	230513	Uang Titipan - Jangka Panjang	Uang Titipan akan diambil kembali oleh pemiliknya di masa mendatang, waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun
356	230514	Liabilitas Imbalan/Pasca Kerja - Jangka Panjang	Liabilitas atas imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya, sebesar iuran yang terutang kepada entitas program dana pensiun, dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun
357	230515	Provisi Pembongkaran Aset dan Lingkungan Hidup	Liabilitas yang timbul akibat biaya pembongkaran aset dan lingkungan hidup atau aset biologis sesuai PSAK 33
358	230516	Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - <i>In Local Currency</i>	Estimasi kerugian komitmen kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah, dalam mata uang rupiah
359	230517	Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - <i>In Foreign Currency</i>	Estimasi kerugian komitmen kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah, dalam mata uang asing
360	230518	Liabilitas Pajak Tangguhan	Jumlah Pajak Penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer kena pajak, saat laba menurut akuntansi lebih besar dibandingkan laba menurut pajak
361	230519	Liabilitas Lainnya - <i>in Local Currency</i> - Jangka Panjang	Liabilitas Lainnya yang wajib dibayarkan perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun setelah tanggal pelaporan, disajikan dalam mata uang rupiah
362	230520	Liabilitas Lainnya - <i>in Foreign Currency</i> - Jangka Panjang	Liabilitas Lainnya yang wajib dibayarkan perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun

			setelah tanggal pelaporan, disajikan dalam mata uang asing
363	310101	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Modal berupa saham yang telah ditempatkan dan dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya
364	310102	Tambahan Modal Disetor - Agio dan Opsi Saham	Tambahan modal disetor berupa kelebihan setoran pemegang saham di atas nilai nominal setelah dikurangi biaya emisi efek ekuitas dan opsi saham.
365	310103	Tambahan Modal Disetor - Penyertaan Modal Negara	Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam bentuk kas tunai dan non-tunai ke entitas yang belum dikonversi menjadi modal saham.
366	310104	Tambahan Modal Disetor - Konversi Utang Menjadi Saham	Tambahan modal disetor berupa restrukturisasi utang dengan cara mengkonversi utang menjadi saham
367	310105	Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali	Tambahan modal disetor yang berupa saldo selisih transaksi dengan pihak non-pengendali, yaitu pihak minoritas dalam kepemilikan perusahaan yang tidak memiliki kendali/ pengaruh
368	310106	Tambahan Modal Disetor - Lainnya	Tambahan modal disetor lainnya yang masuk setelah pembentukan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya
369	310201	Keuntungan (Kerugian) Belum Direalisasi dari Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	Peningkatan atau penurunan nilai aset yang belum dijual, dalam hal ini yaitu aset keuangan yang tersedia untuk dijual
370	310202	Selisih Kurs Mata Uang Asing	Saldo akumulasi penghasilan komprehensif lain atas selisih kurs mata uang asing, merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda
371	310203	Surplus Revaluasi	Saldo akumulasi penghasilan komprehensif lain atas surplus revaluasi atau peningkatan nilai aset sehingga modal dinilai menjadi lebih besar
372	310204	Keuntungan (Kerugian) Instrumen Lindung Nilai	Saldo akumulasi keuntungan/ kerugian dari instrumen lindung nilai (<i>hedging</i>), yaitu instrument meminimalisir risiko kerugian dari aset yang mengalami penurunan nilai

373	310205	Pengukuran Kembali atas Imbalan Kerja Karyawan	Saldo akumulasi pengukuran kembali atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto pada imbalan kerja
374	310206	Penghasilan Komprehensif Lain - Lainnya	Penghasilan yang tidak termasuk dalam penghasilan atau beban yang diakui dalam laba/rugi lainnya
375	310207	Saldo laba - ditentukan penggunaannya	Saldo laba penggunaannya telah ditentukan dan tidak dapat digunakan secara bebas. Saldo laba merupakan Akumulasi hasil usaha periodik yang timbul setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba/rugi periode lalu
376	310208	Saldo laba - tidak/belum ditentukan penggunaannya	Saldo laba yang belum/tidak dialokasikan untuk tujuan penggunaan tertentu. Saldo laba merupakan Akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba/rugi periode lalu
377	310301	Tambahan Modal Disetor - Transaksi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali	Tambahan modal disetor berupa transaksi kombinasi bisnis yang seluruh entitas terlibatnya dikendalikan oleh pihak yang sama dan pengendaliannya tidak bersifat sementara
378	310302	Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya	Saldo bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh entitas berdasarkan BAST dan sampai saat ini tercatat pada entitas
379	310304	Saham Treasuri	Saham yang dibeli kembali oleh pihak perusahaan dengan tujuan tertentu, biasanya untuk menstabilkan harga saham
380	310305	Waran / Kompensasi Bonus dari Saham	Hak bagi pemegang saham untuk membeli saham pada harga yang telah ditentukan emiten atau penerbit waran, yang biasanya disebut sebagai bonus tambahan yang diberikan emiten dari penerbitan saham baru
381	310306	Kepentingan Nonpengendali	Saldo atas hak kepemilikan pemegang saham minoritas pada anak perusahaan dan anak perusahaan yang telah

			dikonsolidasikan oleh tetapi tidak sepenuhnya dimiliki oleh induk.
382	310307	Ekuitas Lainnya	Ekuitas lainnya yang tidak masuk dalam klasifikasi ekuitas yang telah ada
383	410101	Pendapatan Perdagangan/Penjualan Terkait Usaha	Pendapatan yang berasal dari <i>Core</i> Bisnis / Inti usaha dari aktivitas operasional perusahaan. Contoh: Pendapatan Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas LPG oleh PT Pertamina
384	410102	Pendapatan Jasa	Pendapatan jasa diluar <i>Core</i> Bisnis perusahaan. Contoh: PT Semen Indonesia (Persero) selain menjual produk semen sebagai <i>Core</i> Bisnisnya, juga menyediakan jasa seperti pengolahan limbah, penambangan kapur dan tanah liat, serta jasa teknologi informasi
385	410103	Pendapatan Sewa dan Sewa Pembiayaan	Pendapatan sewa yang berasal dari sewa tanah, gedung bangunan, dan peralatan mesin serta yang berasal dari pembiayaan yaitu sewa dalam bentuk pendanaan jangka panjang yang menyebabkan perpindahan risiko manfaat aset kepada penyewa
386	410104	Pendapatan KSO	Pendapatan sesuai dengan kontrak Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) yang telah disetujui bersama-sama oleh para masing-masing anggota Kemitraan/KSO secara tertulis
387	410105	Pendapatan Subsidi dan Kompensasi Pemerintah	Pendapatan yang berasal dari Subsidi dan Kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah dari APBN. Contoh: Pendapatan Subsidi dan Kompensasi Pemerintah pada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) berasal dari subsidi dan kompensasi energi BBM, LPG 3 Kg, dan listrik
388	410106	Pendapatan Operasional Lainnya - Umum	Pendapatan yang berasal dari hasil yang langsung dari

			kegiatan operasional suatu perusahaan sebagai hasil usaha pokok yang dilakukan oleh perusahaan
389	410201	Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah - Keuangan	Pembagian keuntungan keuangan baik berupa bunga dari bank umum/berupa bagi hasil syariah dari bank syariah
390	410202	Pendapatan Premi	Pendapatan atas jasa asuransi yang didapatkan oleh entitas yang bergerak dalam industri asuransi
391	410208	Pendapatan Premi DJS	Pendapatan atas jasa asuransi yang didapatkan oleh DJS BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
392	410203	Pendapatan Provisi dan Komisi	Pendapatan terkait dengan <i>fee based income</i> dalam bentuk Provisi dan Komisi di entitas industri Perbankan
393	410204	Pendapatan Dividen - Keuangan	Pendapatan dividen yang diperoleh pada entitas/industri keuangan. Dividen merupakan bagian dari laba/pendapatan suatu perusahaan berupa uang Tunai (Rupiah) yang besarnya telah ditetapkan oleh direksi dan juga disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham
394	410205	Pendapatan <i>Underwriting</i>	Pendapatan yang berasal dari imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi
395	410206	Pendapatan Investasi dan Investasi DJS	Pendapatan yang diperoleh perusahaan hasil pelaksanaan kegiatan investasi atas bidang-bidang tertentu Contoh : pembayaran dividen, bunga, atau <i>capital gain</i> dari penanaman modal atau penjualan aset
396	410207	Pendapatan Industri Keuangan Lainnya	Pendapatan lainnya merupakan pendapatan operasional dari industri keuangan
397	420101	Pendapatan Dividen - Non Keuangan	Pendapatan dividen yang diperoleh entitas/industri umum atau non keuangan
398	420102	Bagian Laba/ Rugi Ventura Bersama/	Pendapatan dari bagian laba/rugi dari ventura bersama,

		Entitas Asosiasi/ Anak/ Penyertaan Saham	entitas asosiasi, entitas anak, atau penyertaan saham yang diperoleh oleh industri umum/non keuangan
399	420103	Laba Akuisisi/ Pelepasan Entitas Anak	Laba atas transaksi akuisisi atau pelepasan entitas anak perusahaan
400	420104	Pendapatan Reksadana	Pendapatan non operasional perusahaan yang berasal dari reksadana yang dimiliki oleh Perusahaan
401	420105	Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Giro	Pendapatan non operasional perusahaan yang berasal dari bunga atas rekening giro perusahaan
402	420106	Pendapatan/ Penghasilan Bunga	Pendapatan atau penghasilan non operasional perusahaan yang berasal dari bunga baik bunga utang, sukuk, obligasi, atau sejenisnya. Untuk industri umum, bunga utang, sukuk, dan obligasi dicatat pada akun ini. Namun untuk industri keuangan, dicatat pada pendapatan investasi
403	420107	Pendapatan Keuangan	Pendapatan yang diperoleh oleh industri umum/non keuangan dan berasal dari keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lainnya
404	420108	Pendapatan Deposito	Pendapatan non operasional perusahaan yang berasal dari deposito perusahaan
405	420109	Pendapatan Klaim dan Denda	Pendapatan non operasional perusahaan atas klaim/hak perusahaan dan pembayaran denda yang diterima perusahaan
406	420110	Pendapatan Sewa	Pendapatan non operasional perusahaan yang berasal dari sewa
407	420111	Piutang dari Pemerintah	Pendapatan non operasional atas pembayaran piutang dari Pemerintah
408	420112	Laba Selisih Kurs Mata Uang Asing	Pendapatan yang timbul atas keuntungan/laba diterima perusahaan dari selisih kurs mata uang asing
409	420113	Penghasilan Pendanaan	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas kegiatan pendanaan yang dilakukan perusahaan baik berbentuk utang atau ekuitas

410	420114	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Piutang Usaha	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai piutang usaha yang dimiliki perusahaan
411	420115	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Tagihan Bruto kepada Pelanggan	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai tagihan bruto kepada pelanggan
412	420116	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Piutang Lain-lain	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai piutang lain-lain yang dimiliki perusahaan
413	420117	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Piutang Subsidi Pemerintah	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai piutang subsidi pemerintah
414	420118	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Goodwill	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai goodwill yang dimiliki perusahaan
415	420119	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Persediaan	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai persediaan
416	420120	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Aset Tetap	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai Aset Tetap
417	420121	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Aset Tak Berwujud	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai Aset Tak Berwujud
418	420122	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Tanaman perkebunan	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai tanaman perkebunan
419	420123	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Aset Eksplorasi dan Evaluasi	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan penyesuaian nilai aset eksplorasi dan evaluasi
420	420124	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Properti Pertambangan	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai properti pertambangan

421	420125	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Lain-lain	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai lain-lain
422	420126	Manfaat Pajak Penghasilan - Pajak Tanggahan	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas penghasilan non operasional atas manfaat Pajak Penghasilan berupa Pajak yang ditangguhkan (Pajak Tanggahan)
423	420127	Laba Penjualan Aset Tetap	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan atas penjualan aset tetap yang disebabkan oleh harga jual aset tetap lebih besar daripada nilai wajar aset tetap yang dijual
424	420128	Pendapatan Non Operasional Lainnya	Pendapatan non operasional lainnya yang tidak masuk dalam klasifikasi pendapatan non operasional yang telah ada.
425	420201	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Giro pada Bank Lain	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai giro pada bank lain
426	420202	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Penempatan Bank Lain	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai penempatan bank lain
427	420203	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Obligasi Pemerintah	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai obligasi pemerintah
428	420204	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Efek-efek	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai efek-efek
429	420205	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Penyertaan Saham	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai penyertaan saham
430	420206	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Piutang Premi	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai piutang premi
431	420207	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Piutang Koasuransi	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai piutang

			koasuransi
432	420208	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Piutang Reasuransi	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas euntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai piutang reasuransi
433	420209	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Piutang Hasil Investasi	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai piutang hasil investasi
434	420210	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Pinjaman Polis/ Liabilitas Asuransi/Estimasi Kewajiban Klaim	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai pinjaman polis/liabilitas asuransi/estimasi kewajiban klaim
435	420211	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Kredit dan Pembiayaan Syariah	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai kredit dan pembiayaan syariah
436	420212	Pendapatan Keuntungan dan Kenaikan Nilai - Aset Keuangan Lainnya	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan dan kenaikan atas penyesuaian nilai aset keuangan lainnya
437	420213	Laba Penjualan/Pelepasan Aset Keuangan	Pendapatan non operasional yang diterima perusahaan atas keuntungan atas penjualan aset keuangan disebabkan oleh harga jual aset keuangan lebih besar daripada nilai wajar aset keuangan yang dijual
438	510101	Beban Pokok Pendapatan/Penjualan/Usaha	Pengeluaran langsung atau tidak langsung guna memproduksi barang dan jasa untuk kemudian dijual sebagai Core Bisnis/usaha perusahaan
439	510102	Beban Usaha Jalan Tol	Pengeluaran jalan tol sebagai beban usaha. Contoh: ekspedisi pengiriman Bahan Bakar Minyak oleh Truk Pertamina yang melewati jalan tol untuk didistribusikan ke pom Pertamina
440	510103	Beban Penyusutan, Amortisasi, Deplesi Bagian Beban Pokok	Beban penyusutan, amortisasi, dan depleasi yang merupakan pembentuk beban pokok/HPP/COGS. Beberapa kasus, beban ini dipisahkan dari beban

			penyusutan, amortisasi, dan deplesi biasa. Namun apabila tidak terdapat pemisahan seperti dimaksud, maka penyusutan dan amortisasi dimasukkan pada beban biasa yang bukan bagian dari beban pokok
441	510104	Beban Tenaga Kerja/Pengobatan/Pelatihan Pengembangan	Biaya atas imbalan serta tunjangan/pengobatan/pelatihan kepada pegawai
442	510105	Beban Penyusutan - Gedung dan Bangunan	Biaya penyusutan atas aset Gedung dan Bangunan dikarenakan penurunan nilai manfaat
443	510106	Beban Penyusutan - Jalan dan Jembatan	Biaya penyusutan atas aset Jalan dan Jembatan dikarenakan penurunan nilai manfaat
444	510107	Beban Penyusutan - Peralatan, Mesin dan Komputer	Biaya penyusutan atas aset Peralatan, Mesin dan Komputer dikarenakan penurunan nilai manfaat
445	510108	Beban Penyusutan - Instalasi dan Mesin Pembangkit	Biaya penyusutan aset Instalasi & Mesin Pembangkit penurunan nilai manfaat
446	510109	Beban Penyusutan - Kendaraan dan Sarana Gerak	Biaya penyusutan atas aset Kendaraan dan Sarana Gerak dikarenakan penurunan nilai manfaat
447	510110	Beban Penyusutan - Rangka Pesawat	Biaya penyusutan atas aset Rangka Pesawat dikarenakan adanya penurunan nilai manfaat
448	510111	Beban Penyusutan - Aset dalam Penyelesaian	Biaya penyusutan aset dalam Penyelesaian dikarenakan penurunan nilai manfaat
449	510112	Beban Penyusutan - Aset Tetap Lainnya	Biaya penyusutan atas aset tetap lainnya dikarenakan penurunan nilai manfaat
450	510113	Beban Amortisasi - ATB	Biaya amortisasi atas Aset Tak Berwujud dikarenakan adanya penurunan nilai manfaat
451	510114	Beban Sewa	Beban umum dan administrasi terkait sewa digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasi kantor guna perencanaan dan pengendalian secara umum.
452	510115	Beban Perlengkapan Kantor dan ATK	Biaya operasional berupa biaya secara rutin atas perlengkapan kantor dan alat tulis kantor
453	510116	Beban Perbaikan dan Pemeliharaan	Biaya operasional berupa biaya atas pembayaran jasa perbaikan dan pemeliharaan berkala

454	510117	Beban Komunikasi, Telekomunikasi, dan Data	Biaya operasional berupa biaya telekomunikasi operasional dan data operator seluler
455	510118	Beban Transportasi, Angkutan, dan Perjalanan Dinas	Biaya operasional berupa biaya atas pengeluaran transportasi untuk kegiatan operasional
456	510119	Beban Penelitian dan Pengembangan / Pendidikan dan Pelatihan	Biaya operasional berupa atas kegiatan pengembangan dan riset
457	510120	Beban Jasa Profesional	Biaya operasional berupa biaya pembayaran atas pekerjaan jasa ahli dan profesional
458	510122	Beban Teknologi Informasi	Biaya operasional berupa biaya pengeluaran terkait transaksi teknologi informasi
459	510123	Beban Keamanan dan Screening	Biaya operasional berupa biaya pengeluaran terkait transaksi keamanan dan screening
460	510124	Beban Pajak, Iuran, Retribusi, Bea Masuk, dan Perizinan	Biaya operasional berupa biaya pengeluaran terkait transaksi perpajakan, iuran, retribusi, bea masuk, dan perizinan
461	510125	Beban Premi Asuransi	Biaya operasional berupa biaya atas pengeluaran terkait premi asuransi
462	510126	Beban Iuran Keanggotaan	Biaya operasional berupa biaya pengeluaran terkait transaksi iuran keanggotaan
463	510127	Beban Sumbangan Sosial/Hadiah/PKBL	Biaya operasional berupa biaya atas pengeluaran terkait Sumbangan Sosial/ Hadiah/ PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan)
464	510128	Beban Utilitas/Listrik, Air, dan Gas	Biaya operasional berupa biaya atas transaksi pengeluaran utilitas, air, dan gas
465	510129	Beban Kesehatan	Biaya operasional berupa biaya atas transaksi pengeluaran kesehatan
466	510130	Beban Rapat Kerja dan Perjamuan	Biaya operasional berupa biaya atas pengeluaran terkait rapat kerja dan perjamuan
467	510131	Beban Pemasaran/Promosi	Biaya operasional berupa biaya atas pengeluaran terkait pemasaran/promosi
468	510132	Beban Umum dan Administrasi Lainnya	Biaya operasional berupa biaya atas pengeluaran umum dan administrasi lainnya
469	510133	Imbalan Pasca Kerja	Beban atas kewajiban imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya

470	510134	Beban Operasional Lainnya	Beban operasional lainnya yang tidak masuk dalam klasifikasi beban operasional yang telah ada
471	510201	Beban Bunga dan Beban Syariah/Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	Beban bunga yang terkait industri keuangan maupun non keuangan dan/atau beban yang dibayarkan kepada bank atau pihak lain berkaitan fasilitas pinjaman maupun pembiayaan yang diterima untuk industri keuangan konvensional maupun syariah, serta berkaitan dengan dana syirkah temporer yang diterima untuk industri keuangan syariah
472	510203	Beban Klaim Asuransi dan Reasuransi	Beban yang terdiri dari klaim dan manfaat asuransi yang pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa diasuransikan, serta klaim reasuransi atas kewajiban reasuradur sehubungan dengan perjanjian reasuransi
473	510204	Beban Provisi dan Komisi	Beban operasional berupa beban provisi dan beban komisi. Beban provisi adalah biaya operasional berupa biaya dipotong dari jumlah pinjaman, sedangkan beban komisi adalah biaya operasional berupa biaya yang diperhitungkan kepada nasabah bank Pengguna jasa bank
474	510205	Beban Operasional Keuangan Lainnya	Beban operasional keuangan lainnya selain beban bunga, beban syariah, beban klaim asuransi dan reasuransi, serta beban provisi dan komisi
475	520101	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Piutang Usaha	Beban kerugian dan penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan serta penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa piutang usaha
476	520102	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Tagihan Bruto kepada Pelanggan	Beban kerugian dan penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan serta penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa tagihan bruto kepada pelanggan
477	520103	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Piutang Lain-lain	Beban kerugian dan penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan serta penurunan nilai atas aset non-

			keuangan berupa piutang lain-lain
478	520104	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Piutang Subsidi Pemerintah	Beban kerugian dan penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan serta penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa piutang subsidi pemerintah
479	520105	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Goodwill	Beban kerugian dan penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan serta penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa Goodwill
480	520106	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Persediaan	Beban kerugian dan penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan serta penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa persediaan
481	520107	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Aset Tetap	Beban kerugian dan penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan serta penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa aset tetap
482	520108	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Aset Tak Berwujud	Beban kerugian dan penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan serta penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa aset tak berwujud
483	520109	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Tanaman perkebunan	Beban kerugian dan penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan serta penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa tanaman perkebunan
484	520110	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Aset Eksplorasi dan Evaluasi	Beban kerugian dan penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan serta penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa aset eksplorasi dan evaluasi
485	520111	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Properti	Beban kerugian dan penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan serta penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa properti
486	520112	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Properti Pertambangan	Beban kerugian dan penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan serta penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa properti pertambangan

487	520113	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Lain-lain	Beban kerugian dan penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan serta penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa lain-lain
488	520114	Kerugian Selisih Kurs	Kerugian selisih kurs selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda
489	520115	Bagian Rugi Entitas Asosiasi, Ventura Bersama, dan Pengendalian Bersama	Biaya atas kerugian entitas asosiasi, ventura bersama, dan pengendalian bersama
490	520116	Beban Bunga/Denda/Sanksi - Non Keuangan	Beban bunga, denda, dan sanksi dari pinjaman yang diterima
491	520117	Beban Pajak Final	Beban atas PPh final berupa pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak (WP) menerima penghasilan
492	520118	Beban Pajak Penghasilan - Pajak Kini	Beban pajak penghasilan perusahaan yang dihitung berdasarkan tarif pajak penghasilan dikalikan dengan laba fiskal, yaitu laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan.
493	520119	Beban Pajak Penghasilan - Pajak Tangguhan	Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan
494	520120	Kepentingan Nonpengendali - P/L	Bagian laba pemegang saham minoritas pada entitas/perusahaan dan anak perusahaan selain Induk perusahaan dan Pemerintah
495	520121	Beban Keuangan Lainnya - Non Keuangan	Beban non operasional keuangan lainnya yang ada pada Industri Umum/Non Keuangan
496	520122	Beban Lain-lain	Beban lain-lain selain beban keuangan yang tidak masuk dalam klasifikasi beban non operasional yang telah ada
497	520201	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Giro pada Bank Lain	Beban penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa giro

			pada bank lain
498	520202	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Penempatan Bank Lain	Beban penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa penempatan bank lain
499	520203	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Obligasi Pemerintah	Beban penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa obligasi pemerintah
500	520204	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Efek-efek	Beban penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa efek-efek
501	520205	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Penyertaan Saham	Beban penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa penyertaan saham
502	520206	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Piutang Premi	Beban penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa piutang premi
503	520207	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Piutang Koasuransi	Beban penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa piutang koasuransi
504	520208	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Piutang Reasuransi	Beban penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa piutang reasuransi
505	520209	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Piutang Hasil Investasi	Beban penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa piutang hasil investasi
506	520210	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Pinjaman Polis / Liabilitas Asuransi/Estimasi Kewajiban Klaim	Beban penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa pinjaman polis/ liabilitas asuransi/estimasi kewajiban klaim
507	520211	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Kredit dan Pembiayaan Syariah	Beban penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa kredit dan pembiayaan syariah

508	520212	Beban Kerugian dan Penurunan Nilai - Aset Keuangan Lainnya	Beban penurunan nilai atas aset keuangan dari entitas non-keuangan penurunan nilai atas aset non-keuangan berupa aset keuangan lainnya yang tidak masuk dalam klasifikasi aset keuangan yang telah ada
509	610101	Bagian atas Penghasilan Komprehensif Entitas Asosiasi	Pendapatan atas penghasilan komprehensif entitas asosiasi
510	610102	Bagian atas Penghasilan Komprehensif Ventura Bersama	Pendapatan atas penghasilan komprehensif ventura bersama
511	610201	Keuntungan dari penjualan aset keuangan yang diklasifikasikan tersedia untuk dijual dan dimiliki untuk diperdagangkan	Keuntungan dari penjualan aset keuangan yang belum direalisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual
512	610202	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Penghasilan komprehensif atas selisih antara nilai tercatat aset dan nilai hasil revaluasi
513	610203	Keuntungan Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	Penghasilan komprehensif atas selisih dari keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti
514	610204	Manfaat Pajak Penghasilan terkait Penghasilan Komprehensif Lainnya yang Tidak Direklasifikasikan ke Laba Rugi	Pajak penghasilan yang timbul terkait dengan penghasilan komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasikan ke laba rugi
515	610205	Penghasilan Komprehensif Lainnya - Tidak Direklasifikasikan ke Laba Rugi	Penghasilan komprehensif lainnya yang tidak dapat direklasifikasi ke laba rugi
516	610301	Surplus Cadangan Lindung Nilai Arus Kas	Penghasilan komprehensif atas instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya, dari risiko variabilitas arus kas terkait dengan diakuinya asset/kewajiban (misalnya, pembayaran bunga atas pinjaman dengan suku bunga variabel)/ramalan terjadinya transaksi (misalnya, penjualan /pembelian yang akan dilakukan) masa mendatang, di mana variabilitas arus kas diperkirakan mempengaruhi laba/rugi yang dilaporkan

517	610302	Keuntungan Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Penghasilan komprehensif atas selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
518	610303	Keuntungan Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	Penghasilan komprehensif atas selisih atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual
519	610304	Manfaat Pajak penghasilan terkait Penghasilan Komprehensif Lainnya yang Direklasifikasikan ke Laba Rugi	Pajak penghasilan yang timbul terkait dengan penghasilan komprehensif lainnya yang direklasifikasikan ke laba rugi
520	610305	Penghasilan Komprehensif Lainnya - Direklasifikasikan ke Laba Rugi	Penghasilan komprehensif lainnya yang dapat direklasifikasikan ke laba rugi
521	620101	Bagian atas Kerugian Komprehensif Entitas Asosiasi	Akumulasi atas kerugian komprehensif entitas asosiasi
522	620102	Bagian atas Kerugian Komprehensif Ventura Bersama	Akumulasi atas kerugian komprehensif ventura bersama
523	620201	Rugi Revaluasi Aset Tetap	Kerugian komprehensif atas selisih antara nilai tercatat aset dan nilai hasil revaluasi
524	620202	Kerugian Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	Kerugian komprehensif atas selisih kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti
525	620203	Pajak Penghasilan terkait Penghasilan Komprehensif Lainnya yang Tidak Direklasifikasikan ke Laba Rugi	Pajak penghasilan dibayarkan terkait dengan penghasilan komprehensif lainnya yang tidak direklasifikasikan ke laba rugi
526	620204	Kerugian Komprehensif Lainnya - Tidak Direklasifikasikan ke Laba Rugi	Kerugian komprehensif lainnya yang tidak dapat direklasifikasi ke laba rugi
527	620301	Defisit Cadangan Lindung Nilai Arus Kas	Kerugian komprehensif atas instrumen derivatif/instrumen keuangan lainnya dari risiko variabilitas arus kas terkait diakuinya aset/kewajiban (misalnya pembayaran bunga pinjaman dengan suku bunga variabel)/ramalan suatu transaksi (misalnya penjualan/pembelian yang akan dilakukan) dimasa mendatang dimana variabilitas arus kas itu diperkirakan mempengaruhi

			laba atau rugi yang dilaporkan
528	620302	Selisih Kurs karena Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing	Kerugian komprehensif atas selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
529	620303	Kerugian Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	Kerugian komprehensif atas selisih perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual
530	620304	Pajak penghasilan terkait Penghasilan Komprehensif Lainnya yang Direklasifikasikan ke Laba Rugi	Pajak penghasilan yang dibayar terkait dengan penghasilan komprehensif lainnya yang direklasifikasikan ke laba rugi
531	620305	Kerugian Komprehensif Lainnya - Direklasifikasikan ke Laba Rugi	Kerugian komprehensif lainnya yang dapat direklasifikasikan ke laba rugi
532	600000	Laba (Rugi) Komprehensif	Hasil dari total pendapatan/penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran dari Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
533	710101	Penerimaan Pendapatan/Piutang Usaha/Operasional/Penjualan	Penerimaan kas yang berasal dari pendapatan/piutang usaha/operasional/penjualan
534	710102	Penerimaan Pendapatan Bunga, Dividen Bunga, Marjin	Penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Bunga, Dividen Bunga, Marjin
535	710103	Penerimaan dari Pendapatan Syariah	Penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Syariah
536	710104	Penerimaan Pendapatan Premi Asuransi, Reasuransi, dan Retrosesi	Penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Premi Asuransi, Reasuransi, dan Retrosesi
537	710121	Pendapatan Premi DJS	Pendapatan atas jasa asuransi yang didapatkan oleh DJS BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
538	710105	Penerimaan Pendapatan Provisi dan Komisi	Penerimaan kas berasal dari Pendapatan Provisi dan Komisi
539	710106	Penerimaan Pendapatan Hasil Investasi	Penerimaan kas berasal dari Pendapatan Hasil Investasi
540	710107	Penerimaan Pendapatan Iuran Anggota	Penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Iuran Anggota
541	710108	Penerimaan Klaim Asuransi, Reasuransi, dan Retrosesi	Penerimaan kas berasal dari Klaim Asuransi, Reasuransi, dan Retrosesi
542	710109	Penerimaan <i>Fee</i> , Resi Gudang, dan Pasar Lelang	Penerimaan kas berasal dari <i>Fee</i> , Resi Gudang, dan Pasar Lelang
543	710110	Penerimaan dari Jasa Penasihat Keuangan,	Penerimaan kas yang berasal dari Jasa Penasihat Keuangan,

		Konsultasi Manajemen dan Investasi	Konsultasi Manajemen dan Investasi
544	710111	Penerimaan Imbalan Jasa Penjaminan	Penerimaan kas yang berasal dari Imbalan Jasa Penjaminan
545	710112	Penerimaan Kembali Aset/Kredit yang telah Dihapusbukukan	Penerimaan kas yang berasal dari Aset/Kredit yang telah Dihapusbukukan
546	710113	Penerimaan dari Pemerintah	Penerimaan kas yang berasal dari Pemerintah
547	710114	Penerimaan dari Pelanggan	Penerimaan kas yang berasal dari Pelanggan
548	710115	Penerimaan Transaksi Pembiayaan	Penerimaan kas yang berasal dari Transaksi Pembiayaan
549	710116	Penerimaan Penggantian Biaya	Penerimaan kas yang berasal dari Penggantian Biaya
550	710117	Penerimaan Restitusi Pajak	Penerimaan kas yang berasal dari Restitusi Pajak
551	710118	Penerimaan Penjualan Obligasi Pemerintah	Penerimaan kas yang berasal dari Penjualan Obligasi Pemerintah
552	710119	Penerimaan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) dan Subsidi Pemerintah	Penerimaan kas yang berasal dari <i>Public Service Obligation</i> (PSO) dan Subsidi Pemerintah
553	710120	Penerimaan Aktivitas Operasi Lainnya	Penerimaan kas yang berasal dari Aktivitas Operasi Lainnya
554	710201	Pembayaran Beban Umum dan Administrasi	Pembayaran kas untuk keperluan umum dan administrasi
555	710202	Pembayaran Beban Pegawai	Pembayaran kas kepada pegawai
556	710203	Pembayaran Beban Bunga, Dividen Bunga, Marjin	Pembayaran kas sehubungan dengan Bunga, Dividen Bunga, dan Marjin
557	710204	Pembayaran dari Beban Syariah	Pembayaran kas untuk biaya Syariah
558	710205	Pembayaran Beban Premi Asuransi, Reasuransi, dan Retrosesi	Pembayaran kas sehubungan dengan Premi Asuransi, Reasuransi, dan Retrosesi
559	710206	Pembayaran Beban Provisi dan Komisi	Pembayaran kas sehubungan dengan Provisi dan Komisi
560	710207	Pembayaran Klaim Asuransi, Reasuransi, dan Retrosesi	Pembayaran kas untuk Klaim Asuransi, Reasuransi, dan Retrosesi
561	710208	Pembayaran Imbalan Jasa	Pembayaran kas sehubungan dengan Imbalan Jasa

562	710209	Pembayaran kepada Pemasok, Pihak Ketiga, dan Karyawan	Pembayaran kas kepada Pemasok, Pihak Ketiga, dan Karyawan
563	710210	Pembayaran Beban/Utang Usaha	Pembayaran kas sehubungan dengan pengeluaran/Utang Usaha
564	710211	Pembayaran Pajak	Pembayaran kas sehubungan dengan Pajak
565	710212	Pembayaran Penyaluran Pembiayaan Konsumen	Pembayaran kas Penyaluran Pembiayaan Konsumen
566	710213	Pembayaran Imbalan Kerja	Pembayaran kas sehubungan dengan Imbalan Kerja
567	710214	Pembayaran kepada Pemerintah	Pembayaran kas kepada Pemerintah
568	710215	Pembayaran Aktivitas Operasi Lainnya	Pembayaran kas sehubungan dengan Aktivitas Operasi Lainnya
569	710301	Penempatan pada BI dan Bank Lain	Pengeluaran kas untuk penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain
570	710302	Rekening Bank/Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Pengeluaran kas untuk penempatan pada Rekening Bank/ Kas yang Dibatasi Penggunaannya
571	710303	Saham dan Saham Preferen	Pembayaran kas untuk membeli Saham dan Saham Preferen
572	710321	Obligasi/Sukuk/Obligasi atau Sukuk Pemerintah	Pembayaran kas untuk membeli Obligasi/ Sukuk/ Obligasi/Sukuk Pemerintah
573	710322	Efek-efek Lainnya	Pembayaran kas untuk membeli efek-efek lainnya
574	710304	Investasi Bersih	Penerimaan (Pembayaran) kas sehubungan dengan investasi bersih
575	710305	Pajak Dibayar Di Muka, Biaya Dibayar Di Muka dan Uang Muka	Penerimaan (Pembayaran) kas sehubungan dengan pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka dan uang muka
576	710306	Piutang dan Piutang <i>Reverse Repo</i>	Penerimaan kas yang berasal dari Piutang dan Piutang <i>Reverse Repo</i>
577	710307	Pinjaman/Kredit/Pembiayaan Konsumen/Syariah	Penerimaan kas berasal dari Pinjaman/Kredit/ Pembiayaan Konsumen/Syariah
578	710308	Tagihan Wesel, Akseptasi, dan Tagihan Lainnya	Pembayaran kas untuk pembayaran Tagihan Wesel, Akseptasi, dan Tagihan Lainnya
579	710323	Tagihan Derivatif	Pembayaran kas untuk pembayaran tagihan derivatif

580	710309	Persediaan	Pembayaran kas untuk perolehan persediaan
581	710310	Aset Lain-lain	Pembayaran kas untuk perolehan aset lain-lain
582	710311	Liabilitas Segera	Pembayaran kas untuk pembayaran liabilitas segera
583	710312	Liabilitas Akseptasi, dan Lain-lain	Pembayaran kas pembayaran Liabilitas Akseptasi, dan Lain-lain
584	710324	Liabilitas Derivatif	Pembayaran kas untuk pembayaran liabilitas derivatif
585	710313	Beban Yang Masih Harus Dibayar	Pembayaran kas untuk Beban Yang Masih Harus Dibayar
586	710314	Pendapatan Diterima Di Muka	Penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Diterima di Muka
587	710315	Simpanan Nasabah dan Bank Lain	Penerimaan kas yang berasal dari Simpanan Nasabah dan Bank Lain
588	710316	Dana Syirkah Temporer dan Investasi Syariah	Penerimaan kas yang berasal dari Dana Syirkah Temporer dan Investasi Syariah
589	710317	Utang Usaha, Utang Pajak, dan Utang Lainnya	Pembayaran kas untuk pembayaran Utang Usaha, Utang Pajak, dan Utang Lainnya
590	710318	Efek-efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali dan Interbank Call Money	Pembayaran kas untuk pembelian Efek-efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali dan <i>Interbank Call Money</i>
591	710319	Imbalan Kerja	Pembayaran kas untuk pembayaran imbalan kerja
592	710320	Penerimaan (Pengeluaran) dari Operasi yang Dihentikan dari Aktivitas Operasional	Penerimaan (Pembayaran) kas dari Operasi yang Dihentikan dari Aktivitas Operasional
593	720101	Penerimaan dari Kas Dibatasi Penggunaannya/Deposito /Deposito Berjangka	Penerimaan kas berasal Kas Dibatasi Penggunaannya/ Deposito/Deposito Berjangka
594	720102	Penerimaan dari Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Penerimaan kas yang berasal dari Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
595	720103	Penerimaan dari Efek-efek/Obligasi	Penerimaan kas yang berasal dari Efek-efek/Obligasi
596	720104	Penerimaan dari Aset Keuangan Lancar Lainnya	Penerimaan kas yang berasal dari Aset Keuangan Lancar Lainnya

597	720105	Penerimaan/Pendapatan/ Penjualan dari Aset Tetap	Penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan/Penjualan Aset Tetap
598	720106	Penerimaan/Pendapatan/ Penjualan dari Aset Tak Berwujud	Penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan/Penjualan Aset Tak Berwujud
599	720107	Penerimaan/Pendapatan/ Penjualan dari Properti Investasi	Penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan/Penjualan Properti Investasi
600	720108	Penerimaan/Pendapatan/ Penjualan dari Aset Guna Usaha/Hak Guna	Penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Aset Guna Usaha/ Hak Guna
601	720109	Penerimaan/Pendapatan/ Penjualan dari Aset Lainnya	Penerimaan kas berasal dari Pendapatan/Penjualan Aset Lainnya
602	720110	Penerimaan/Pendapatan Klaim/Denda	Penerimaan kas berasal dari Pendapatan Klaim/ Denda
603	720111	Penerimaan dari Jaminan/Pencairan Jaminan	Penerimaan kas berasal dari Jaminan/Pencairan Jaminan
604	720112	Penerimaan/Pendapatan Sewa/Uang Muka Sewa	Penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Sewa/Uang Muka Sewa
605	720113	Penerimaan/Pendapatan Bunga	Penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Bunga
606	720114	Penerimaan dari Pelepasan/Penjualan/Ke naikan Saham	Penerimaan kas berasal dari Pelepasan/Penjualan/ Kenaikan Saham
607	720115	Penerimaan dari Pelepasan/Penjualan/Ke naikan Investasi DJS/Investasi Lainnya	Penerimaan kas berasal dari Pelepasan/Penjualan/ Kenaikan Investasi DJS/ Investasi Lainnya
608	720116	Penerimaan dari Penyertaan Saham/Kerjasama Usaha/Entitas Anak dan Entitas Asosiasi	Penerimaan kas berasal dari Penyertaan Saham/Kerjasama Usaha/Entitas Anak dan Entitas Asosiasi
609	720117	Penerimaan/Pendapatan dari Dividen	Penerimaan kas yang berasal dari Pendapatan Dividen
610	720118	Penerimaan dari Pelepasan Anak Perusahaan	Penerimaan kas berasal dari Pelepasan Anak Perusahaan
611	720119	Penerimaan dari Pengembalian Dana/Uang Muka/Pinjaman/Piutang Penjaminan	Penerimaan kas berasal dari Pengembalian Dana/Uang Muka/Pinjaman/Piutang Penjaminan
612	720120	Penerimaan Aktivitas Investasi Lainnya	Penerimaan kas berasal dari Aktivitas Investasi Lainnya
613	720201	Pengeluaran dari Kas Dibatasi Penggunaannya/Deposito /Deposito Berjangka	Pengeluaran kas dari Kas yang Dibatasi Penggunaannya/ Deposito/ Deposito Berjangka

614	720202	Pengeluaran dari Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	Pengeluaran kas perolehan Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual/Dimiliki Hingga Jatuh Tempo
615	720203	Pengeluaran dari Efek-efek/Surat Berharga/Obligasi	Pengeluaran kas untuk perolehan dalam Efek-efek/Surat Berharga/ Obligasi
616	720204	Pengeluaran dari Aset Keuangan Lancar Lainnya	Pengeluaran kas untuk perolehan Aset Keuangan Lancar Lainnya
617	720205	Pengeluaran/Pembelian dari Aset Tetap	Pengeluaran kas untuk Pembelian Aset Tetap
618	720206	Pengeluaran/Pembelian dari Aset Tak Berwujud	Pengeluaran kas untuk Pembelian Aset Tak Berwujud
619	720207	Pengeluaran/Pembelian dari Properti Investasi	Pengeluaran kas untuk Pembelian Properti Investasi
620	720208	Pengeluaran/Pembelian dari Aset Guna Usaha/Hak Guna	Pengeluaran kas untuk perolehan Aset Guna Usaha/Hak Guna
621	720209	Pengeluaran/Penempatan Piutang/Uang Muka	Pengeluaran kas untuk Penempatan Piutang/Uang Muka
622	720210	Pengeluaran/Pembelian dari Aset Lainnya	Pengeluaran kas untuk Pembelian Aset Lainnya
623	720211	Pengeluaran/Pembelian Saham/Investasi/Investasi DJS	Pengeluaran kas untuk Pembelian Saham/Investasi/Investasi DJS
624	720212	Pengeluaran dari Jaminan/Pencairan Jaminan	Pengeluaran kas dari Jaminan/Pencairan Jaminan
625	720213	Pengeluaran dari Dana/Uang Muka/Pinjaman/Piutang Penjaminan/Beban Tangguhan	Pengeluaran kas dari Dana/Uang Muka/Pinjaman/Piutang Penjaminan/ Beban Tangguhan
626	720214	Pengeluaran Aktivitas Investasi Lainnya	Pengeluaran kas untuk Aktivitas Investasi Lainnya
627	720301	Penerimaan (Pengeluaran) dari Operasi yang Dihentikan dari Aktivitas Investasi	Penerimaan (Pengeluaran) kas dari Operasi yang Dihentikan dari Aktivitas Investasi
628	730101	Perolehan Penyertaan Modal/Setoran Modal/Tambahan Setoran Modal /Setoran Modal Saham/Penerbitan Saham/Saham Treasuri/Pihak Kepentingan Entitas Non Pengendali/Pengendali kepada Entitas Anak	Penerimaan kas dari Perolehan Penyertaan/Setoran/Tambahan Setoran/ Setoran /Penerbitan Saham/Saham Treasuri/ Pihak Kepentingan Entitas Non Pengendali/ Pengendali kepada Entitas Anak

629	730102	Perolehan/ Setoran Penyertaan Modal Negara (PMN)/ Tambahan PMN	Penerimaan kas Perolehan/ Setoran Penyertaan Modal Negara (PMN)/ Tambahan PMN
630	730103	Penerimaan Bantuan Pemerintah/Investasi Modal Pemerintah/Pinjaman Pemerintah	Penerimaan kas dari Bantuan Pemerintah/Investasi Modal Pemerintah/Pinjaman Pemerintah
631	730104	Perolehan Utang Obligasi/Sukuk Ijarah/Surat Utang Jangka Menengah/MTN/Subordinasi	Penerimaan kas Perolehan Obligasi/ Sukuk Ijarah/ Surat Utang Jangka Menengah/ MTN/Subordinasi
632	730105	Penerimaan Hasil Obligasi	Penerimaan kas dari Hasil Obligasi
633	730106	Penerimaan Sewa Pembiayaan/Utang Sewa Pembiayaan/Liabilitas Sewa Pembiayaan	Penerimaan kas dari Sewa Pembiayaan/ Utang Sewa Pembiayaan/ Liabilitas Sewa Pembiayaan
634	730107	Perolehan Utang/Pinjaman Bank/Non Bank/Lembaga Keuangan Lain	Penerimaan kas Perolehan Utang/ Pinjaman Bank/Non Bank/Lembaga Keuangan Lain
635	730108	Perolehan Utang/Pinjaman Lain-lain	Penerimaan kas dari Perolehan Utang/ Pinjaman Lain-lain
636	730109	Penerimaan dari Wesel Bayar	Penerimaan kas dari Wesel Bayar
637	730110	Penerimaan dari Kas/Dana yang Dibatas Penggunaannya/Deposito Berjangka/Kas Lain-lain	Penerimaan kas dari Kas/Dana dibatasi Penggunaannya/ Deposito Berjangka/Kas Lain-lain
638	730111	Penerimaan dari Pihak Berelasi dan Entitas Asosiasi/Saham Entitas Anak/Setoran dari Entitas Non Pengendali	Penerimaan kas dari Pihak Berelasi dan Entitas Asosiasi/ Saham Entitas Anak/Setoran dari Entitas Non Pengendali
639	730112	Penerimaan Deviden	Penerimaan kas dari Deviden
640	730113	Penerimaan Aktivitas Pendanaan Lainnya	Penerimaan kas dari Aktivitas Pendanaan Lainnya
641	730201	Penambahan Modal Disetor pada Entitas Anak/Saham Entitas Anak	Pengeluaran kas untuk Penambahan Modal Disetor pada Entitas Anak/Saham Entitas Anak
642	730202	Pembelian Saham Treasuri	Pembayaran kas untuk Pembelian Saham Treasuri
643	730210	Pembayaran/Pelunasan/ Pengembalian Pinjaman/Investasi Pemerintah	Pembayaran kas Pelunasan/ Pengembalian Pinjaman/ Investasi Pemerintah

644	730203	Pembayaran Utang Obligasi/Sukuk Ijarah/Surat Utang Jangka Menengah/MTN/Subordinasi	Pembayaran kas untuk pembayaran Utang Obligasi/Sukuk Ijarah/Surat Utang Jangka Menengah/MTN/Subordinasi
645	730204	Pembayaran Sewa Pembiayaan/Utang Sewa Pembiayaan/Liabilitas Sewa Pembiayaan	Pembayaran kas peruntukan Sewa Pembiayaan/Utang Sewa Pembiayaan/Liabilitas Sewa Pembiayaan
646	730205	Pembayaran Utang/Pinjaman Bank/Non Bank/Lembaga Keuangan Lain	Pembayaran kas pembayaran Utang/ Pinjaman Bank/ Non Bank/ Lembaga Keuangan Lain
647	730206	Pembayaran Utang/Pinjaman Lain-lain	Pembayaran kas pembayaran Utang/Pinjaman Lain-lain
648	730211	Pembayaran Bunga atas Utang/Pinjaman/Obligasi	Pembayaran kas pembayaran Bunga Utang/ Pinjaman/Obligasi
649	730207	Pembayaran Kas yang Dibatasi Penggunaannya/Deposito Berjangka/Kas Lain-lain	Pembayaran untuk Kas yang dibatasi Penggunaannya/ Deposito Berjangka/Kas Lain-lain
650	730208	Pembayaran Deviden	Pembayaran kas untuk pembayaran Deviden
651	730209	Pengeluaran Aktivitas Pendanaan Lainnya	Pengeluaran kas untuk Aktivitas Pendanaan Lainnya
652	730301	Kenaikan/Penurunan Kas yang Dibatasi Penggunaannya	Kenaikan/Penurunan Kas yang Dibatasi Penggunaannya
653	730302	Kenaikan/Penurunan atas Pinjaman/Efek-efek Subordinasi/Efek-efek yang Diterbitkan/Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	Kenaikan/Penurunan Pinjaman/ Efek-efek Subordinasi/Efek-efek Diterbitkan/Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali
654	730303	Kenaikan/Penurunan Investasi di Entitas Anak	Kenaikan/Penurunan kas atas Investasi di Entitas Anak
655	730304	Kenaikan/Penurunan Kewajiban Lainnya	Kenaikan/Penurunan kas atas Kewajiban Lainnya
656	730305	Penerimaan (Pengeluaran) dari Operasi yang Dihentikan dari Aktivitas Pendanaan	Penerimaan (Pengeluaran) kas dari Operasi yang Dihentikan dari Aktivitas Pendanaan
657	700000	Kenaikan (Penurunan) Kas Setara Kas	Hasil dari total pendapatan/penerimaan dikurangi dengan total pengeluaran dari Laporan Arus Kas

658	790000	Dampak Bersih Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas	Perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas akibat perbedaan antara mata uang pelaporan dan mata uang asing
-----	--------	---	--

*) Daftar CoA Korporasi Publik dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

